A M R I Z A L
W I W I T K U R N I A W A N
N I L A S A R I

*Budaya Hukum
Pernikahan Dini
di Masyarakat*

A T R O P O L O G I H U K U M

penapersada

Budaya Hukum Pernikahan Dini
Di Masyarakat

Amrizal

Wiwit Kurniawan

Nilasari

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat

Penulis:

Amrizal
Wiwit Kurniawan
Nilasari

ISBN : 978-623-315-334-8

Editor:

Tri Hidayati

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Tri Anggoro Seto

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Dalam buku ini penulis berusaha menganalisis fenomena budaya hukum menggunakan teori perilaku masyarakat, dengan harapan bisa mengetahui pengaruh budaya masyarakat dalam membentuk budaya hukum masyarakat di Kampung Medang. Karena pada prinsipnya pengaruh budaya pada suatu masyarakat dapat berpengaruh kuat terhadap perilaku hukum yang diterapkannya. Kebudayaan dalam suatu lingkungan masyarakat bisa dipengaruhi oleh faktor agama, adat dan hukum. Dalam pembahasan di buku ini peneliti berusaha menganalisis mengenai faktor dominan yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Bapak/Ibu dan saudara - saudari semua. Dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Persoalan tentang Pernikahan Dini di Indonesia	1
B. Pernikahan Dini dan Undang-Undang Perkawinan	6
C. Pernikahan Dini di Masyarakat Indonesia	9
BAB II KONSEP BUDAYA DAN PERILAKU HUKUM DI MASYARAKAT	
A. Budaya	14
1. Definisi Budaya	14
2. Wujud Kebudayaan	15
3. Unsur-unsur Kebudayaan	18
4. Kebudayaan dan Teori Tindakan	22
B. Budaya Hukum	24
1. Pengertian Budaya Hukum	24
2. Tipe Budaya Hukum	33
3. Budaya Hukum Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Perkotaan	37
C. Perilaku Hukum	39
1. Kesadaran Hukum	41
2. Kepatuhan Hukum	46
D. Masyarakat	48
BAB III KONSEP PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN USIA DINI	
A. Pengertian Pernikahan	56
1. Pernikahan Menurut Islam	59
2. Ketentuan Pernikahan Menurut UUP No. 16 Tahun 2019	63
B. Hakikat Pernikahan Usia Dini	65
2. Konsep Teori Pernikahan Usia Dini	66
3. Akibat Pernikahan Dini	69
4. Hubungan Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini	71
BAB IV BUDAYA HUKUM DAN PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI DI MASYARAKAT	
1. Keadaan Geografis	76
2. Keadaan Demografis	80
3. Gambaran Subyek Penelitian	86
B. Gambaran Umum Budaya Hukum Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini	88
C. Analisis Fenomena Pernikahan Dini	93

D. Praktik Pernikahan Usia Dini di Kampung Medang Desa Sukamulya	94
1. Pengetahuan Hukum Masyarakat	100
2. Kepatuhan Hukum Masyarakat	103
E. Budaya Hukum Masyarakat Mendukung Praktik Pernikahan Usia Dini	105
BAB V PENUTUP	115
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I PENDAHULUAN

A. Persoalan tentang Pernikahan Dini di Indonesia

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lazimnya seseorang usia 15 tahun sampai 17 tahun adalah masa-masa seorang anak masih mengenyam bangku pendidikan di Sekolah. Pada kisaran usia tersebut, seorang anak umumnya masih duduk di bangku SMA. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, usia tersebut masuk dalam kategori remaja yang kedudukan hukumnya masih kategori anak, karena masih dibawah usia 18 tahun. Tahapan usia mereka harusnya masih belajar dan mengembangkan kognitif serta mengasah kreatifitas.

Sebuah pendidikan untuk seorang anak sangatlah penting karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akan tetapi pendidikan juga mengajarkan sopan santun dan hal-hal yang benar, pendidikan juga mampu memupuk seseorang menjadi individu dewasa, dalam artian individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Dengan pendidikan pula seseorang

dapat mengembangkan potensi diri dan membangun kemampuan intelektual lewat akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah SWT.

Allah SWT telah memberikan akal kepada manusia untuk berfikir agar tidak menjadi seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan lawan jenisnya tanpa suatu aturan. Demi menjaga kehormatan manusia, maka Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan sesama manusia dalam bermuamalah antara laki-laki dan perempuan diatur dengan cara terhormat dengan pernikahan. Dalam hukum Islam disebut bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang luhur dan sakral sesuai dengan syariat untuk menjalankan ibadah sebagai hamba Allah SWT dan mengikuti sunah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan yang ada pada bab 1 pasal 1 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam bukunya Ensiklopedia Fikih Indonesia tentang Pernikahan menurut Sarwat (2019: viii), pernikahan sebenarnya mengandung keunikan yang tidak ada habisnya, Allah SWT menciptakan manusia

secara individu baik laki-laki maupun perempuan, lalu terjadi pernikahan diantara keduanya, hingga lahirnya manusia baru dari hasil pernikahan itu, yang kemudian muncullah berbagai bangsa, ras dan peradabannya, dan semua itu sangat unik. Oleh karena itu disebutkan bahwa pernikahan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Yang pada umumnya, tanda-tanda kekuasaan itu terkait dengan peristiwa di alam semesta, misalnya perputaran bumi pada porosnya, perlintasan matahari dan bulan atau betapa ajaibnya faal tubuh seekor unta. Dari hal demikian maka agama Islam menilai sebuah perkawinan merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasakan tentram kepadanya dan Dia menjadikan diataramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21)*

Pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa pernikahan maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewa-hewan melata (Sarwat, 2019: 8). Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, karena

ada banyak hikmah dibalik anjuran tersebut salah satunya yaitu supaya manusia berkembang biak untuk menjaga keturunannya dari generasi kegenerasi. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: *"Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (perihalalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu" (QS. An-Nisa: 1).*

Pernikahan juga bisa disebut sebagai sebuah kehidupan persahabatan sebagai teman hidup antara seorang suami dan istri dalam rangka menyempurnakan ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Setiap individu yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk mempunyai keluarga yang harmonis dan sejahtera serta mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, karena itu merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Dari perkawinlanlah akan terbentuk sebuah lembaga kecil yang disebut keluarga dan dari sebuah komunitas keluarga kecil itulah akan terbentuk masyarakat.

Dalam konteks pemahaman hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai perjanjian yang sangat kuat antara kedua orang dewasa dalam hal ini adalah suami dan istri, karena dalam pernikahan tidak hanya sekadar pengucapan ijab-qabul yang disahkan oleh saksi, akan tetapi dalam hubungan pernikahan akan memikul sebuah tanggung jawab, hak dan kewajiban antara suami dan istri

yang harus dipenuhi, serta membawa konsepsi sosiologis yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya pendapat dari Pak Nurzen (wawancara: Rabu, 27 Juli 2020), beliau mengatakan dalam konteks hukum fikih tidak mengatur tentang batasan usia minimal pernikahan, yang terpenting pihak yang mau menikah harus sudah balig, mendapatkan persetujuan dari kedua keluarga mempelai, serta syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi. Jadi disini pernikahan diusia dinipun dinilai tidak menyalahi aturan. Dalam konteks hubungan kekeluargaan, pernikahan merupakan pintu masuk menuju kehidupan baru, keluarga baru, tanggung jawab baru dalam hal membina rumah tangga. Dalam membina kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan kebijaksanaan, kesabaran, keteguhan hati, serta keihlasan. Kebijaksanaan dalam hal ini merupakan cara untuk berfikir bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap masalah yang muncul.

Kesabaran dalam hal ini berarti ketabahan hati dalam menghadapi masalah dalam sebuah keluarga, misalnya adu pendapat karena ketidak selarasan dalam berfikir adalah suatu hal yang pasti akan dijumpai dalam membina rumah tangga. Keteguhan hati dalam artian keteguhan dalam menjaga prinsip yang telah disepakati bersama, seperti halnya ijab-qabul merupakan prinsip awal yang dibangun oleh pihak suami dengan pihak istri, karena dengan terjadinya ijab-qabul maka secara otomatis pula peralihan tanggung jawab seorang wali pindah kepada suami. Keihlasan dalam pernikahan berarti rela secara lahir batin dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.

Mengenai pernikahan hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan di masyarakat adalah tentang sejauh mana masyarakat memahami makna pernikahan. Tentang sejauh mana kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum? Karena berdasarkan fakta sosialnya masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Bogor yang masih sering terjadi praktik pernikahan diusia dini. Hal ini terjadi karena kesadaran dan ketaatan warga terhadap hukum yang masih rendah.

Seiring perubahan dan perkembangan zaman, pola pikir masyarakat juga mengalami perubahan karena pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan dampak terhadap perkembangan dan konsepsi psikologis anak. Maka tidak heran jika banyak anak yang dewasa sebelum waktunya bersifat seperti anak-anak diusia tuanya (tidak siap mental). Sehingga pada sekarang ini tidak sedikit pernikahan diusia dini yang menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Alasannya karena banyak ditemukannya masalah-masalah yang diakibatkan dari pernikahan diusia dini, misalnya ketidak siapan dalam mendidik anak dan meningkatnya angka kematian saat melahirkan, ketidak siapan secara ekonomi dan mental dalam mencapai tujuan pernikah dan lainnya, hal ini sangat membutuhkan perhatian, khususnya dari pemerintah untuk menjaga stabilitas serta menjaga kearifan dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial (Suheri, wawancara: 24 Juli 2020).

B. Pernikahan Dini dan Undang-Undang Perkawinan

Pernikahan anak di usia dini dapat dikatakan melanggar aturan dari

pemerintah, misalnya Undang-Undang Perkawinan dan Undang- Undang Perlindungan Anak yang dirumuskan dengan mempertimbangkan analisis sosiologis dalam menjaga kemaslahatan di kehidupan masyarakat. Selain itu pernikahan diusia dini merupakan salah satu bentuk ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum dan prosedur administrasi hukum yang telah dibuat pemerintah. Oleh karena itu agar pernikahan di usia dini tidak menyalahi aturan, perlu adanya ijin atau dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat yang berkaitan dengan

hal ini, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUP No 1 Tahun 1974.

Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat

(1) disebutkan bahwa pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini dapat dipahami bahwa pernikahan di usia dini yang dilakukan sesuai aturan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing akan diakui dan dianggap sah, karena pencatatan pernikahan bukan satu-satunya syarat sahnya pernikahan yang dilakukan, melainkan kembali lagi pada aturan agama dan kepercayaan masing-masing.

Akan tetapi pada ayat (2) pemerintah juga memberikan ketegasan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk melindungi hak- hak istri dan anak-anak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

(6) ayat 1, dimana setiap pernikahan yang berlangsung harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dalam Pasal (2) disebutkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan diluar dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal ini juga dapat diartikan sebagai ancaman bagi pelaku nikah usia dini yang dampaknya pada status pernikahan yang dilakukan serta status anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 poin b dan c tentang putusnya perkawinan dan akibatnya. Dalam poin b disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sedangkan untuk poin c disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pernikahan diusia dini tidak hanya menyalahi Undang-Undang Perkawinan saja, akan tetapi juga menyalahi Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Di dalam Pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak. Maka hal ini bisa dipahami bahwa pernikahan tidak bisa dilakukan oleh anak yang usianya masih dibawah 18 tahun. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat

(1) diatur, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan sosiologis empirik dan berbagai pertimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang medis, pernikahan di usia dini ternyata memiliki dampak negatif bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Sedangkan dalam pandangan sosiolog pernikahan di usia dini dapat menghalangi keharmonisan dalam keluarga, yang disebabkan karena belum siapnya mental dalam mengelola dan mengatur emosi.

C. Pernikahan Dini di Masyarakat Indonesia

Praktik nikah di usia dini ternyata masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Di Kampung Medang sering terjadi pernikahan di usia dini yang rata-rata dilakukan oleh anak perempuan, yang biasanya putus sekolah ketika menginjak bangku sekolah tingkat SMA (Abidin, wawancara: Kamis, 23 Juli 2020). Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, dari sekian banyak kasus pernikahan diusia dini di Kampung Medang, ada beberapa pernikahan yang berakhir dengan perceraian, karena kurang mampu dalam mengontrol emosi, ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara dewasa dan bijaksana, terutama ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada intinya ketidakharmonisan dan ketidaksejahteraan keluarga pelaku pernikahan usia dini di Kampung Medang disebabkan oleh ketidaksiapan psikis dan fisik serta ketidakmampuan secara ekonomi yang

menimbulkan percekocan yang tidak dapat diselesaikan oleh pelakunya (Nurzen, wawancara: Rabu, 22 Juli 2020).

Selanjutnya yang diungkapkan Ibu Aswiah (Wawancara: Kamis, 23 Juli 2020), beliau mengatakan bahwasanya alasan orang tua dalam menikahkan anaknya di usia dini merupakan cara yang terpenting dalam menjaga anak-anak mereka dari pergaulan bebas yang melanggar aturan agama. Kalau ditinjau dalam konteks agama hal yang demikian merupakan antisipasi yang baik dalam melindungi anak-anak mereka dari perbuatan asusila. Namun jika ditinjau dalam keadaan di zaman sekarang, pola pikir yang harus dibangun oleh orang tua tidak hanya seputar bagaimana perilaku anak dalam pandangan hukum syariat islam saja, melainkan perlu juga dibangun suatu pola pikir yang idealis, substansialis dan sesuai dengan perkembangan

serta kemajuan informasi untuk kemajuan anak dalam menghadapi masa depan yang akan dijalaninya. Dari permasalahan yang sudah peneliti jabarkan diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian lanjutan tentang pernikahan di usia dini di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, yang sampai saat ini angka kasus praktik pernikahannya terus meningkat

karena pengaruh budaya hukum dan kurangnya ketaatan masyarakat kepada hukum masih sebagai faktor utama para orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini.

Praktik pernikahan di usia dini di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, tidak terlepas dari budaya hukum yang membangun perilaku hukum di masyarakat. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis permasalahan dengan menggunakan teori budaya hukum yang berfungsi sebagai senjata untuk menganalisis. Karena menurut peneliti, teori tersebut merupakan senjata yang paling tepat untuk mengetahui tipologi masyarakat dan perilaku hukumnya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kajian di buku ini, penulis akan melakukan penelitian dari aspek yang berbeda, yakni dengan menitikberatkan pada aspek budaya hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan karena mengingat pernikahan di usia dini menerobos aturan perundang-undangan, instruksi pemerintah serta mengesampingkan aspek normatif yuridis yang dirumuskan berdasarkan cita-cita kemaslahatan.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang ada begitu luas. Agar dalam penelitian bisa terarah dan tidak begitu melebar,

maka penulis merasa perlu membuat batasan masalah agar permasalahan lebih fokus, sistematis, dan mendalam. Adapun batasan masalah pada penelitian ini lebih memfokuskan mengenai budaya hukum dikalangan masyarakat Kampung Medang, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Untuk menjelaskan konsep pada fokus penelitian, maka ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah yang dimaksud adalah:

1. Budaya Hukum merupakan suatu konsepsi nilai dan perilaku hukum tertentu dalam suatu kehidupan di masyarakat yang mendapatkan reaksi yang sama dalam komunitas atau kelompok masyarakat tersebut.
2. Usia dini (anak dibawah umur), dalam penelitian ini yang dimaksud usia dini adalah usia anak yang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk juga mereka (anak) yang masih dalam kandungan.
3. Pernikahan usia dini, pernikahan usia dini yang dibahas dipenelitian ini adalah mengenai perkawinan atau ikatan lahir batin anak dibawah usia 18 tahun yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunya baik sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan Pegawai

Pencatat Nikah (PPN), dan baik dicatatkan maupun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB II

KONSEP BUDAYA DAN PERILAKU HUKUM DI MASYARAKAT

A. Budaya

1. Definisi Budaya

Kata “budaya” atau “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian, ke-budaya-an dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Ada pula sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi-daya*, yang berarti “daya dan budi”. Karena itu mereka membedakan “budaya” dan “kebudayaan”. Dengan demikian, pengertian “budaya” adalah “daya dan budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Namun dalam istilah “Antropologi-Budaya” perbedaan itu ditiadakan. Kata “budaya” di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari “kebudayaan” dengan arti yang sama (Koentjaraningrat, 2009:146).

Di samping istilah “kebudayaan” ada pula istilah “peradaban”. Kata “peradaban” sama dengan istilah bahasa Inggris *civilization*. Istilah ini biasa dipakai untuk menyebut bagian dari unsur dari kebudayaan yang

halus, maju, dan indah, misalnya: kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, dan sebagainya. Istilah “peradaban” sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks.

2. Wujud Kebudayaan

Menurut Kroeber dan Parsons (1958: 582-583), pernah menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide dan konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktifitas manusia yang berpola. Menurut Koentjaraningrat (2009: 150-153) bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya, yaitu:

- 1) Wujud sistem budaya, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya.

Wujud ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di dalam kepala atau dengan perkataan lain, dalam alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan bersangkutan itu hidup. Ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu.

Gagasan itu satu dengan yang lain selalu berkaitan menjadi suatu sistem. Para ahli antropologi dan sosiologi menyebut sistem ini sistem budaya atau *cultural system*. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu *adat* atau *adat-istiadat* untuk bentuk jamaknya.

- 2) Wujud sistem sosial, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.

Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial atau social system, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain dari detik kedetik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun, selalu menuntut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-anusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkret yang biasanya terjadi disekeliling kita.

- 3) Wujud kebudayaan fisik, sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut juga dengan kebudayaan fisik. Berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas,

perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, difoto. Ada benda-benda yang sangat besar seperti pabrik baja, ada benda-benda yang amat kompleks dan canggih, seperti komputer berkapasitas tinggi, atau benda-benda yang besar dan bergerak seperti kapal tengki minyak, ada bangunan hasil seni arsitek seperti suatu candi yang indah, atau ada pula benda-benda kecil seperti kain batik.

Ketiga wujud dari kebudayaan terurai tadi, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya. Semua unsur kebudayaan dapat dipandang dari sudut ketiga wujud masing-masing.

3. Unsur-unsur Kebudayaan

Keseluruhan dari tindakan manusia yang berpola itu berada pada pranata-pranata tertentu yang amat banyak jumlahnya. Sebenarnya suatu masyarakat yang luas selalu dapat kita perinci kedalam pranata-pranata yang khusus. Seajar dengan itu suatu kebudayaan yang luas itu selalu dapat kita perinci kedalam unsur-unsurnya yang khusus. Suatu kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, ketika hendak menganalisis membagi keseluruhan itu kedalam unsur-unsur besar yang disebut “unsur-unsur kebudayaan universal” atau cultural universals. Istilah universal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur tadi ada dan bisa didapatkan dalam semua kebudayaan dari semua bangsa dimanapun di dunia.

Menurut Koentjaraningrat (2009: 165-170) bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia itu antara lain, (1) bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) organisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup dan teknologi, (5) sistem mata pencaharian hidup, (6) sistem religi, (7) kesenian.

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam tiga wujud kebudayaan terurai diatas, yaitu wujudnya berupa sistem budaya, berupa sistem sosial, dan berupa unsur-unsur kebudayaan

fisik. Dengan demikian unsur religi misalnya mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surga, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai wujud berupa upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang kadang kala, dan selain itu setiap sistem religi juga mempunyai wujud sebagai benda-benda suci dan benda- benda religious. Contoh lain adalah unsur universal kesenian yang dapat berwujud gagasan, ciptaan pikiran, dan syair yang indah. Namun kesenian juga dapat berwujud tindakan-tindakan interaksi berpola antara seniman pencipta, seniman penyelenggara, pendengar, penonton, dan konsumen hasil kesenian, tetapi selain itu semua kesenian juga berupa benda-benda indah seperti candi, kain tenun, batik, benda kerajinan dan sebagainya.

Konsep mengenai ketujuh unsur kebudayaan universal merupakan satu sistem pemerincian dari suatu keseluruhan kedalam bagian- bagianya. Tiap “unsur kebudayaan universal” dapat diperinci kedalam unsur-unsurnya yang lebih kecil sampai beberapa kali. Karena serupa dengan kebudayaan dalam keseluruhan, tiap unsur kebudayaan universal itu juga mempunyai tiga wujud, yaitu wujud sistem budaya, wujud sistem sosial, dan wujud kebudayaanfisik, maka pemerincian dari ketujuh unsur tadi masing-masing harus juga dilakukan dalam ketiga wujud itu.

Wujud sistem budaya dari suatu unsur kebudayaan universal berupa adat, dan pada tahap pertamanya adat dapat diperinci kedalam

beberapa kompleks budaya, tiap kompleks budaya dapat diperinci lebih lanjut kedalam beberapa tema budaya dan akhirnya pada tahap ketiga tiap tema budaya dapat diperinci kedalam gagasan.

Serupa dengan itu, sistem sosial dari suatu unsur kebudayaan universal yang berupa aktivitas-aktivitas sosial dapat kita perinci pada tahap pertamanya kedalam berbagai kompleks sosial, dan pada tahap kedua, tiap kompleks sosial dapat diperinci lebih khusus kedalam berbagai pola sosial. Pada tahap ke empat, tiap pola sosial dapat diperinci lebih khusus kedalam berbagai tindakan.

Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing tentu juga mempunyai wujud fisik, walaupun tidak ada satu wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur kebudayaan universal. Itulah sebabnya kebudayaan fisik tidak perlu diperinci menurut keempat tahap pemerincian seperti yang dilakukan pada sistem budaya dan sistem sosial. Namun semua unsur kebudayaan fisik sudah tentu secara khusus terdiri dari benda-benda kebudayaan.

Misalkan dari pemerincian adat dan aktivitas sosial kedalam beberapa kompleks budaya dan kompleks sosial adalah misalnya pemerincian dari sistem kekerabatan kedalam: perkawinan, tolong menolong antara kerabat, sopan-santun pergaulan antar kerabat, sistem istilah kekerabatan dan sebagainya. Contohnya perkawinan, unsur ini

boleh dikata terdapat didalam semua masyarakat di dunia. Namun seperti halnya contoh sistem kekerabatan tersebut diatas, demi logika sistematik pemerincian maka sistem perkawinan tidak disebut sebagai unsur kebudayaan universal, tetapi tetap kompleks budaya dan kompleks sosial saja.

Usaha pemerincian dapat dilanjutkan untuk memerinci kompleks budaya dan kompleks sosial kedalam tema budaya dan pola sosial. Contohnya: perkawinan dapat diperinci kedalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah nikah, poligami, poliandri, perceraian dan sebagainya.

Akhirnya masih ada satu tahap pemerincian lagi, yaitu pemerincian dari tema budaya dan pola sosial kedalam gagasan dan tindakan. Dalam hal ini sub-sub unsur mas kawin misalnya dapat diperinci satu langkah lebih lanjut lagi kedalam sub-sub unsur yang kecil seperti: bagian harta mas kawin yang berupa tanah, berupa ternak, berupa benda adat, berupa benda-benda perlambangan, berupa benda perhiasan, berupa uang tunai, upacara penyerahan mas kawin, upacara pertukaran harta pengantin pria dan harta pengantin wanita dan sebagainya.

Diantara unsur-unsur golongan yang kecil diatas biasanya tidak ada yang bersifat universal, karena unsur-unsur kebudayaan seperti itu sudah terlampau kecil. Apabila ditinjau dari contoh mengenai sub-sub unsur “mas kawin ” maka tampak bahwa “harta mas kawin yang berupa ternak” tidak

terdapat disemua kebudayaan di dunia.

4. Kebudayaan dan Teori Tindakan

Menurut Koentjaraningrat (2009: 179-183) bahwa kebudayaan itu hanya ada pada makhluk manusia, kebudayaan mula-mula hanya merupakan satu aspek dari proses evolusi manusia. Kebudayaan tidak lepas dari kepribadian individu melalui suatu proses belajar yang panjang, menjadi milik dari masing-masing individu warga masyarakat. Dalam proses ini kepribadian atau watak tiap-tiap individu pasti juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan itu dalam keseluruhannya. Akhirnya gagasan-gagasan, tingkah laku, atau tindakan manusia itu ditata, dikendalikan dan dimantapkan pola-polanya oleh berbagai sistem nilai dan norma yang seolah-olah berada di atasnya.

Pandangan menyeluruh dan terintegrasi mengenai konsep kebudayaan, memandang bahwa kebudayaan sebagai tindakan manusia yang berpola dan biasa disebut dengan kerangka teori tindakan (Frame of Reference of the Theory of Action). Di dalamnya terkandung konsepsi bahwa dalam hal menganalisis bahwa dalam hal menganalisis suatu kebudayaan dalam keseluruhan perlu dibedakan secara tajam antara empat komponen, yaitu: (1)sistem budaya, (2)sistem sosial, (3)sistem kepribadian, dan (4)sistem organisme. Keempat komponen tersebut, walaupun erat berkaitan satu dengan yang lain, tetapi merupakan entitas yang khusus, masing-masing dengan sifat-sifatnya sendiri.

Sistem budaya atau cultural system merupakan komponen yang abstrak

dari kebudayaan yang terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan- gagasan, konsep-konsep, tema-tema berpikir, dan keyakinan-keyakinan. Dengan demikian, sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut adat-istiadat. Diantara adat- istiadat seperti yang telah dipelajari, ada sistem nilai budayanya, sistem normanya, yang seara lebih khusus lagi dapat diperinci kedalam berbagai macam norma menurut pranata-pranata yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Fungsi dari budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia.

Sistem sosial atau social system, seperti yang telah diuraikan sosial sistem terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia atau tindakan-tindakan dan tingkah laku berinteraksi antar individu dalam kehidupan masyarakat. Sebagai rangkaian tindakan berpola yang berkaitan satu sama lain, sistem sosial itu bersifat lebih konkret dan nyata dari pada sistem budaya, dalam arti bahwa tindakan manusia itu dapat dilihat dan diobservasi. Interaksi manusia itu di satu pihak ditata dan diatur oleh sistem budaya, tetapi di pihak lain dibudayakan menjadi pranata-pranata oleh nilai dan norma tersebut.

Sistem kepribadian (personality system) mengenai isi jiwa dan watak individu yang berinteraksi sebagai warga masyarakat. Kepribadian individu dalam suatu masyarakat, walaupun berbeda-beda satu sama lain, namun juga distimulasi dan dipengaruhi oleh nilai dan norma dalam sistem budaya, serta oleh pola-pola bertindak dalam sistem sosial yang telah diinternalisasi melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama selama hidup sejak masa kecilnya. Dengan demikian, sistem kepribadian manusia berfungsi sebagai

sumber motivasi dari tindakan sosialnya.

Sistem organisme (organic system) melengkapi seluruh kerangka dengan mengikutsertakan kedalamnya proses biologis dan biokimia dalam organisme manusia sebagai suatu jenis makhluk alamiah yang apabila dipikirkan lebih mendalam juga ikut menentukan kepribadian individu, pola-pola tindakan manusia dan bahkan juga gagasan-gagasan yang dicetuskannya.

B. Budaya Hukum

1. Pengertian Budaya Hukum

Menurut Hadikusuma (seperti dikutip Amrizal Siagian, 2015: 51), mengatakan bahwa Budaya Hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengadung budaya hukum itu. Misalnya bagaimana sikap perilaku dan tanggapan masyarakat tertentu terhadap sikap perilaku dan pandangan masyarakat yang lain. Tanggapan yang sama itu dapat bersifat menerima atau bersifat menolak budaya hukum yang lain, begitu pula halnya terhadap norma-norma hukum sendiri

yang dikehendaki berlaku atau norma-norma hukum lain.

Selanjutnya pembahasan Budaya Hukum bertujuan agar dapat mengenal ciri-ciri (atribut) yang sesuai untuk mengkaji proses yang berlanjut maupun yang berubah atau yang seirama dengan perkembangan masyarakat dikarenakan sifat kontrol social itu tidak selamanya tetap. Perubahan-perubahan Budaya Hukum itu tidak saja berlaku di kalangan masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan, walaupun terjadinya

perubahan itu tidak sama cepat atau lambat terdapat pada keadaan, waktu, dan tempat (Siagian, 2015: 35).

Menurut Nitibaskara (seperti dikutip Siagian, 2015: 56), mencoba mendefinisikan budaya hukum, adalah: “yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial”. Untuk merumuskan definisi budaya hukum setidaknya memiliki beberapa faktor variabel. Pertama, Sub Budaya. Budaya hukum (legal culture) merupakan sub-unsur budaya, yaitu yang berinduk pada unsur budaya normatif yang bersifat universal. Kedua, Manusia. Unsur manusia yang menjadi fokus utama budaya hukum sangat berperan sebagai pembentuk dan pendukung serta pengubah, bahkan sebagai penilai tentang baik dan buruknya budaya hukum orang lain. Ketiga, Penghargaan dan sikap tindak. Variabel ini merupakan unsur yang mendorong kelahiran perilaku yang dapat disebut budaya hukum. Keempat, Hukum sebagai realitas sosial. Dalam batasan ini, hukum tidak diperkenankan untuk dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang pada suatu periode tertentu. Artinya, realitas budaya hukum terlihat dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahaminya harus melihat konteks sistem budaya secara umum.

Hadikusuma mengatakan bahwa Budaya Hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-

gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengadung budaya hukum itu. Misalnya bagaimana sikap perilaku dan tanggapan masyarakat tertentu terhadap sikap perilaku dan pandangan masyarakat yang lain. Tanggapan yang sama itu dapat bersifat menerima atau bersifat menolak budaya hukum yang lain, begitu pula halnya terhadap norma-norma hukum sendiri yang dikehendaki berlaku atau norma-norma hukum lain (Hadikusuma, 2010: 51).

Dikarenakan pemahaman (persepsi) budaya hukum itu pada kenyataannya sering nampak berkaitan dengan peradaban dan teknologi, maka tidak salahnya budaya hukum itu juga disebut peradaban hukum, seperti halnya budaya politik dapat diartikan sebagai peradaban politik (Rusadi Kantaprawira, 1983: 29). Masalahnya dikarenakan budaya hukum itu meliputi orientasi pribadi yang berlatar belakang pada pengetahuan

dan pengalaman seseorang yang menyebabkan adanya penilaian, sehingga ia menyetujui atau menolak, atau mendiadakan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi.

Dengan demikian budaya hukum itu merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa dalam masyarakat. Oleh karena sistem hukum itu merupakan hubungan yang kait mengkait diantara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan, maka titik perhatian antropologi hukum pada perilaku manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandangnya yang eklektika. Antara keduanya bertemu dalam peristiwa hukum yang terjadi, oleh karenanya dengan melakukan studi kasus diharapkan dapat menemukan jawaban sejauh mana orang seorang itu setuju atau tidak setuju terhadap cara penyelesaian hukum mengenai sesuatu perselisihan hukum (Hadikusuma: 2010: 53).

"We define legal culture to mean attitudes, values and opinions sheld in society, with regard to law, the legal system and its various parts. So define, it's the legal culture wich determines when, why, and where, people use law, legal institusion or legal process: and when they use other institutions,or do nothing. In

other wards, culture factors are ann essential ingredient in turning a static structure and a static collections of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motions” (Lawrence, 2009: 76).

Artinnya : “Kita mendefinisikan hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat-pendapat sosial yang dianut dalam masyarakat mengenai hukum dan beragam bagianya. Artinya budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa dan dimana orang-orang menggunakan hukum atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan institusi-institusi lainnya atau tidak melakukan apapun. Dengan kata lain, faktor-faktor budaya merupakan unsur esensial untuk dapat mengubah sesuatu struktur statis dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum dalam hal ini seperti memutar jarum jam atau menghidupkan sebuah mesin. Budaya hukum itu menggerakkan sesuatu”.

Dari definisi diatas maka dapat dipahami bahwa budaya hukum diartikan sebagai suatu konstruksi penggerak suatu sistm hukum yang lahir dari kekuatan-kekuatan dan sikap-sikap sosial. Laurance menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur dari sikap-sikap dan nilai sosial untuk itu ia disebut sebagai penggerak suatu sistem hukum. Budaya hukum berkaitan erat dengan bagian-bagian dari budaya umum, yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, dan cara berfikir yang mengarah kekekuatan-kekuatan sosial kearah atau menjauhi hukum ke cara-cara khusus. Istilah budaya hukum digunakan untuk menggambarkan

fenomena yang terkait dengan pengetahuan masyarakat dan pola perilaku masyarakat tentang sistem hukum.

“Basically, legal culture refers to two rather different sets of attitudes and values: the of the general public (we can call this „law legal culture), and the of lawyers, judges, and other professionals (we call this internal legal culture). Lay legal culture can exist on many level. It is possible to speak of the legal culture of France or Negeria as a whole (attitudes and values which, on the whole are characteristic of Frenchmen or Negerians) there are also regional, local or group attitudes and values about law: those of the Yoruba, or Jews, or Britons, or plumbers, cabdrivers, big business executives” (Lawrance, 2009: 76).

Artinya : “Pada dasarnya budaya hukum mengacu pada dua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang agak berbeda : perangkat sikap-sikap publik (kita bisa menyebut ini sebagai budaya hukum awam), dan perangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim, dan professional lainnya (kita bisa menyebut ini sebagai budaya hukum internal). Budaya hukum awam dapat eksis di banyak level. Dimungkinkan bicara tentang budaya hukum Prancis dan Negeria sebagai suatu keutuhan (sikap- sikap, nilai-nilai yang secara keseluruhan, khas orang-orang Prancis atau khas orang-orang Negeria). Terdapat pula sikap-sikap dan nilai-nilai regional, local atau kelompok tentang hukum: sikap- sikap dan nilai-nilai orang Yoreba, atau orang-orang yahudi, atau orang-orang Broton, atau para tukang leding, atau para sopir, para eksekutif besar”.

Diantara dua perangkat tersebut, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai publik umum (budaya hukum kaum awam), dan perangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim, dan professional hukum lainnya

(budaya hukum internal). Dari kedua budaya ini yang lebih eksis adalah budaya hukum umum karena bisa dipakai pada budaya hukum yang lain (Lawrence, 2009: 76). Misalnya : budaya hukum nikah di usia dini yang merupakan ciri khusus di Kampung Medang, Rumpin bisa juga berlaku di daerah lain yang memiliki perangkat nilai dan sikap yang serupa dengan budaya perilaku masyarakat Kampung Medang, Rumpin.

Budaya hukum sangat erat kaitanya dengan sebuah kebudayaan, dimana setiap masyarakat dalam suatu komunitas yang memiliki reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu dalam suatu masyarakat. Reaksi ini yang disebut sebagai kebudayaan. Menurut Hadikusuma (1986: 51) budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Misalnya masyarakat di Kampung Medang yang menjadikan pernikahan di usia dini sebagai suatu wujud penjagaan orang tua terhadap anak dalam pergaulan yang melanggar syariat. Budaya seperti ini diterima oleh semua lapisan masyarakat meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa pernikahan harus dilakukan atas sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. Tanggapan itu merupakan suatu kesatuan dari pandangan masyarakat di Kampung Medang.

"The term legal culture has been loosely used to describe a number of related phenomena. First, it refers to public knowledge of and attitudes and behavior

patterns toward the legal system" (Lawrance, 2009:193).

Artinya: *"Istilah budaya hukum selama ini secara longgar digunakan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Pertama, istilah tersebut mengacu pada pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Sikap orang-orang yang berbeda antara satu dengan yang lain itu dipengaruhi oleh proporsi-proporsi yang dikonstruksi oleh orang itu sendiri".*

Seperti contohnya tindakan seseorang yang bertolak dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan karena menilai hal ini tidak perlu atau ketidakmauan untuk menyelesaikan perceraian di muka pengadilan karena menilai keadilan yang diberikan hakim bukan suatu keadilan, atau mungkin sikap pilih-pilih ketentuan hukum (agama atau perundang-undangan), hukum apa yang lebih mereka ikuti dan dianggap lebih benar dan sah, kemudian mengenai pemahaman mereka mengenai hukum yang berbeda-beda.

Perilaku hukum satu masyarakat berbeda dengan perilaku hukum dimasyarakat yang lain. Maka dari itu, budaya hukum bersifat bisa menerima ataupun menolak terhadap suatu peristiwa hukum. Kaitan antara perilaku hukum dan budaya hukum dalam masyarakat terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandang yang elektika. Kedua sudut pandang itu bertemu dalam peristiwa hukum yang terjadi yang menyebabkan suatu perselisihan

hukum (Hadikusuma, 1986: 52). Tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu perselisihan hukum tidak terlepas dari suatu orientasi yang umum dalam suatu masyarakat yang merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya hukum dan keadilan yang dirasakan, dikehendaki dan dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Tipe Budaya Hukum

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi budaya hukum masyarakat, menurut Hadikusuma (2010: 54) perilaku kehidupan masyarakat dikelompokkan dalam tiga kategori antara lain yaitu: budaya parokial (parokial culture), budaya partisipan (partisipan culture), dan budaya subjek (subject culture).

Ciri masyarakat parokial culture dapat dilihat dari cara berfikir masyarakat yang masih sangat terbatas. Maksudnya tanggapan masyarakat dari tipologi ini masih terbatas hanya pada kalangan sendiri. Masyarakat tipologi ini masih kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri. Masyarakat parokial masih meyakini bahwa kaidah-kaidah budaya yang merupakan warisan para leluhur merupakan azimat yang tidak bisa dilanggar agar terhindar dari kutukan ghaib. Pada masyarakat parokial, ketergantungan masyarakat lebih banyak diserahkan kepada pemimpin. Sehingga masyarakat tipologi ini menjadikan pimpinanya

sebagai pusatnya. Bahayanya, jika pemimpin masyarakat tipologi ini bersifat egosentris, maka ia akan mementingkan dirinya sendiri dan sulit untuk berurusan dengan orang lain. Dengan demikian kegiatan masyarakat diarahkan pada kepentingan dirinya pribadi. Tetapi, sebaliknya jika pemimpin masyarakat tersebut bersifat altruis, maka warga masyarakat mendapatkan perhatian karena pemimpin mereka menempatkan dirinya untuk melayani kepentingan warga masyarakatnya.

Kegiatan pengetahuan dalam budaya masyarakat parokial ini sangat rendah, sehingga penilaian terhadap sejarah dan penerapan hukum setempat diserahkan kepada sesepuh adat (kepala adat/suku) yang terbatas likasi kekuasaanya. Tanggapan masyarakat terhadap perilaku hukum dan peradilan sangat kecil, apalagi terhadap sistem dan konsepsi hukum yang tidak ada sama sekali. Budaya masyarakat parokial biasanya menyerahkan semua urusanya kepada pemimpin mereka, dengan begitu setiap keputusan pemimpin selalu dipatuhi karena kepercayaan mereka itulah adanya sangsi ghaib akibat dari melanggar aturan. Dengan demikian budaya masyarakat parokial tidak berkembang dan tidak akan menerima hukum yang lain (diluar kalangnya) karena menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum yang lain (Hadikusuma, 2010: 55).

Masyarakat yang memiliki budaya hukum subjek sedikit berbeda dari masyarakat parokial. Masyarakat pada budaya hukum subjek

memiliki ciri khusus yang bersifat takluk kepada pemimpin. Cara berfikir masyarakat pada tipologi ini sedikit lebih berkembang, mereka sudah memiliki kesadaran hukum yang umum terhadap output penguasa yang lebih tinggi. Masukan anggota masyarakat pada tipologi ini masih sangat rendah, dikarenakan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat pada ruang lingkup yang kecil. Orientasi masyarakat budaya subjek terhadap hukum yang baru sudah ada, misalkan adanya sikap menolak atau menerima, walaupun cara pengungkapannya masih bersifat pasif, tersembunyi atau tidak terang-terangan dikarenakan perilaku sifat takluk tadi.

Premis yang dibangun pada masyarakat tipologi budaya takluk, masih beranggapan bahwa dirinya tidak berdaya dalam mempengaruhi hukum apalagi sampai merubah sistem hukum, konsepsi hukum, keputusan, hukum, norma hukum yang dihadapinya walaupun hukum yang disajikan terlihat bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Ketaatan masyarakat tipologi ini bukan berarti sebagai penerimaan terhadap keputusan pemimpin, melainkan karena dibangun oleh sifat takluk mereka karena anggapan ketidak mampuan mereka (Hadikusuma, 2010: 56).

Sedangkan dalam masyarakat budaya hukum partisipan mereka turut aktif dalam berperan serta, karena cara berfikir dan perilaku

masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, tetapi sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta, alasannya karena mereka merasa bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini setiap individu sudah mulai mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mereka tidak mau dikucilkan dari kegiatan input dan output hukum. Mereka ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, seperti merasa terlibat dalam kehidupan hukum yang baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya (Hadikusuma, 2010: 58).

Sebagaimana dikemukakan di atas budaya hukum tersebut dapat berjalan sejajar bergandengan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dalam kenyataan akan nampak budaya hukum yang campuran diantar ketiganya dalam masyarakat, apalagi jika hal itu dilihat dari segi yang lebih luas, yaitu dari sudut-sudut nasional, maka akan nampak budaya hukum yang nasional yang merupakan budaya kewarganegaraan (civic culture). Budaya hukum sebagaimana diuraikan di atas hanya merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi system dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga besar pengaruhnya terhadap budaya hukum, seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi, dan politik serta letak tempat kediaman, lingkungan hidup dan cara

kehidupan, disamping sifat watak pribadi seorang, yang kesemuanya saling bertautan (Siagian, 2015: 52).

Dalam hal ini maka perlu diperhatikan apakah setiap penerimaan terhadap output hukum dari penguasa terjadi karena kesadaran hukum atau karena sifat takluk, begitu juga sebaliknya setiap persetujuan terhadap input yang menyangkut hukum dari anggota masyarakat terhadap penguasa, apakah dilatar belakangi kesadaran hukum sebagai masyarakat yang baik ataukah mengandung niat yang lain.

3.

Budaya Hukum Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Perkotaan

Masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*)

mempunyai ciri tersendiri yaitu afektifitas ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih. Orientasi kolektif sifat tersebut merupakan konsekuensi dari afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan. Masyarakat tradisional ini disebut juga masyarakat sederhana (rural community) yang mana dengan masyarakat perkotaan (urban community) terdapat perbedaan. Menurut Soekanto perbedaan tersebut

sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota.

Secara umum masyarakat sederhana lebih tersosialisasi dengan kepribadian yang sederhana. Masyarakat sederhana lebih bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya dan masyarakatnya lebih ramah terhadap orang asing yang belum dikenalnya. Untuk kepribadian, masyarakat sederhana lebih terkesan santai karena kerjanya tidak terlalu berat seperti masyarakat perkotaan. Pola solidaritas sosial masyarakat sederhana timbul karena adanya kesamaan-kesamaan kemasyarakatan.

Budaya hukum masyarakat sederhana dan masyarakat perkotaan pada hakekatnya bersifat gradual. Masing-masing mempunyai sistem tersendiri, dengan fungsi-fungsi sosial dan struktur serta proses-proses sosial yang sangat berbeda.

Konsep hukum masyarakat sederhana sebagaimana menurut B. Malinowski mengatakan bahwa aturan hukum apabila aturan itu dirasakan dan dianggap menimbulkan kewajiban di satu pihak dan hak lain pihak, maka aturan hukum itu mempunyai sanksi negatif atau sanksi positif berdasarkan kejiwaan dan adanya mekanisme. Kekuatan yang mengikat tersebut terwujud dari adanya hubungan timbal balik yang didasarkan pada adanya hak untuk saling menuntut. Berbeda dengan

pendapat Kantorowicz dalam masyarakat sederhana adanya seperangkat aturan yang menuntut berlakunya yang ekstern dalam bentuk perbuatan bukan perasaan dan aturan ini harus jelas sehingga dapat diterapkan untuk kebutuhan pengadilan yang mengandung unsur keharusan menurut latar belakang budaya masyarakat.

C. Perilaku Hukum

Menurut M. Friedman (seperti dikutip Ali, 2009: 57) dalam bukunya Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan mendefinisikan perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap perbuatan manusia yang lahir karena dipengaruhi oleh Undang-Undang, aturan, keputusan pemerintah, maka perilaku itu disebut dengan perilaku hukum.

Perilaku hukum tidak hanya mengenai perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah internal (aturan, keputusan, perintah atau Undang-Undang), tetapi pandangan lain menyebutkan bahwa perilaku hukum bisa jadi segala sesuatu yang dipengaruhi oleh komponen (aturan, keputusan, perintah atau Undang-Undang) meskipun itu perbuatan yang bertentangan. Misalnya seperti diaturnya Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia

minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun, maka perkawinan yang dilakukan diluar aturan tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku, termasuk juga perilaku hukum.

Fiedman menjelaskan bahwa perilaku hukum tidak hanya perilaku taat hukum atau tidak taat menjalankan tetapi juga reaksi use (menggunakan) atau notuse (tidak menggunakan) suatu aturan hukum. Fietman juga menegaskan seyogyanya kita menghindari kata atau istilah “taat” atau “tidak taat”, karena istilah tersebut sedikit menyesatkan. Menurutnya tidak semua perbuatan hukum itu mengacu pada aturan, ketentuan dan Undang-Undang (Lawrence, 2009: 285). Misalnya dalam berumah tangga, ketika ada masalah pasangan suami istri berhak mempertimbangkan rumah tangganya antara bercerai atau tidak bercerai. Dalam kontek ini tidak ditemukan aturan baik dalam Undang-undang Perkawinan (UUP), Kaidah Hukum Islam (KHI), KUHP yang menganjurkan perceraian. Apabila kedua pasangan suami-istri mampu menyelesaikan masalah dalam keluarganya, namun keduanya sepakat untuk bercerai misalnya karena alasan sudah tidak ada kecocokan, ini diluar ketentuan yang berlaku. Namun secara hukum hal ini tidak dapat disalahkan dan hukumpun tidak dapat mencegah perbuatan tersebut.

Dalam hal ini maka dapat dipahami bahwa segala perilaku atau sikap yang terjadi dengan kesengajaan karena pengaruh tiga komponen

diatas (aturan, keputusan, perintah atau Undang-Undang) baik perbuatan tersebut sesuai dengan kaidah atau bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diatur disebut dengan perilaku hukum. Oleh karena itulah Soerjono Soekanto membedakan perilaku hukum dalam dua kategori. Yang pertama, perilaku taat hukum yaitu suatu perilaku yang tercermin karena adanya kesadaran bahwa hukum berdampak positif apabila ditaati, perilaku ini disebut juga dengan kesadaran hukum. Selanjutnya yang kedua, perilaku tidak taat hukum yaitu perilaku yang menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor tidak adanya kesadaran internal oleh subjek hukum . berikut akan dijelaskan secara lebih mendetail tentang perilaku hukum yang diterjemahkan oleh para pakar hukum yang ada di Indonesia dan juga aspek-aspek yang berkaitan tentang hal tersebut.

1. Kesadaran Hukum

1) Kesadaran Hukum Terkait Pendidikan

Pendidikan kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat penting. Pendidikan kesadaran hukum merupakan salah satu sarana untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Dengan harapan, masyarakat dapat lebih sadar terhadap hukum dan mewujudkannya dengan perilaku sesuai dengan hukum.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan di usia dini. Karena dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan pola pikir seseorang menjadi sempit. Di Kampung Medang kebanyakan masyarakatnya tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, ini berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat kemas depan sangat rendah. Daripada anaknya hanya diam di rumah para orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Di Kampung Medang masih terdapat orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini tanpa mempertimbangkan usia anak, hal itu dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri. Dengan demikian sangat pentingnya suatu pendidikan karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam melakukan perilaku hukum.

2) Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1989:196), kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum kongkrit, melainkan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/hukum yang

tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut meliputi penilaian apakah hukum tersebut adil atau tidak adil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan proses psikhis yang terdapat dalam diri pribadi individu yang mungkin dimiliki atau mungkin tidak dimiliki. Akan tetapi tentang azas kesadaran hukum terdapat dalam setiap individu oleh sebab itulah manusia memiliki rasa keadilan.

3) Indikasi Adanya Kesadaran Hukum

Untuk mengetahui adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, dapat dilihat dari berbagai aspek yang mampu menjelaskan sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat tertentu. Aspek-aspek tersebut antara lain:

a) Pengetahuan Hukum

Adanya pengetahuan secara konsepsional terhadap hukum tertulis, misalnya adanya perundang-undangan sebagai alat pengatur masyarakat secara umum, adanya peraturan daerah yang hanya diberlakukan khusus di daerah tertentu, adanya surat edaran, intruksi presiden untuk pejabat berwenang yang juga memiliki kekuatan hukum yang perlu diikuti. Maupun hukum tidak tertulis seperti hukum adat, tradisi, dan adat kebiasaan.

b) Norma-Norma Hukum

Adanya penghayatan dalam masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta kesadaran bahwa hukum diatur dengan tujuan yang baik untuk masyarakat secara umum untuk mewujudkan kedamaian hidup bersama yang menyangkut ketertiban dan ketentraman. Hal ini merupakan salah satu yang bisa dijadikan indikasi adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat.

c) Kaidah-Kaidah Hukum

Pemahaman masyarakat mengenai adanya kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Adanya pemahaman ini menciptakan kesadaran dalam masyarakat bahwa kehidupan bersama akan tertib jika terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

d) Perilaku Hukum

Perilaku hukum masyarakat adalah indikasi yang mencerminkan suatu masyarakat sadar hukum atau tidak sadar hukum. Dalam tahap ini dapat dinilai dengan melihat perilaku masyarakat apakah perilaku hukum masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau tidak, jika perilaku hukum masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur

berarti masyarakat tersebut dapat dinilai sebagai masyarakat yang sadar hukum karena pemahamannya terhadap tujuan hukum. Tetapi sebaliknya, apabila mereka acuh tak acuh terhadap hukum karena ketidak sadarnya terhadap tujuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut tidak sadar hukum (Sudarsono, 2001: 66)

4) Peningkatan Kesadaran Hukum

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, idealnya harus ada perencanaan yang matang untuk kemudian dilakukan penyuluhan hukum oleh para petugas hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum-hukum tertentu, dengan demikian masyarakat bisa mengetahui dan memahami mengenai hukum- hukum tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya penyuluhan hukum tentang aturan perkawinan, pajak, wakaf dan masih banyak lainnya. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban serta manfaatnya apabila mentaati hukum tertentu.

Penyuluhan hukum haruslah diberikan oleh para pihak petugas hukum kepada masyarakat secara langsung, dengan cara memberikan edukasi atau pendidikan khusus agar dapat

tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Penyuluhan hukum kepada masyarakat bisa dijadikan sebagai pondasi dasar yang kokoh dan kuat bagi masyarakat supaya terhindar dari perilaku oknum petugas hukum yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian masyarakat terhindar dari kepentingan-kepentingan penegak hukum (yang tidak bertanggung jawab) yang menggunakan hukum sebagai jalan menakut-nakuti masyarakat (Soerjono Soekanto, 1989: 199)

2. Kepatuhan Hukum

1) Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan *output* akhir tentang hukum yang dihasilkan oleh masyarakat. Sebagaimana kutipan Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul Menjelajahi Kajian Empiris dalam Hukum, Oetomo mengklasifikasikan kesadaran hukum masyarakat menjadi dua kategori yaitu kesadaran hukum yang baik dan kesadaran hukum yang buruk (Ali, 2013: 141). Dari kategori tersebut dapat didefinisikan bahwa ketaatan hukum merupakan perilaku kesadaran hukum yang positif, alasannya karena dari kesadaran positif itulah ketaatan terhadap suatu aturan hukum yang tertulis atau tidak tertulis mampu diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari dalam suatu sistem hukum itu sendiri.

2) Klasifikasi Kepatuhan Hukum

Sebagaimana dikutip Ali, H. Kelman Untuk meninjau kepatuhan hukum masyarakat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis sifat yaitu sebagai berikut:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, artinya ketaatan masyarakat terhadap hukum, karena ada rasa takut pada sangsi-sangsi yang ditetapkan. Contoh: menggunakan helem saat berkendara karena takut ditilang polisi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, artinya ketaatan masyarakat terhadap hukum karena hubungan baiknya kepada seseorang menjadi rusak. Contoh: untuk hukum perkawinan, seorang suami yang tidak poligami karena tidak mendapatkan ijin dari istri pertamanya.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, artinya ketaatan masyarakat terhadap hukum karena aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dipercayainya. Dengan kata lain, kepatuhannya terhadap hukum murni karena kesadaran jika aturan tersebut secara substansi baik untuk diikuti.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya kepatuhan terhadap hukum sifatnya fariatif, ada yang patuh hukum karena tekanan dan ada juga karena murni

kesadaranya terhadap hukum itu sendiri. Dari ketiga sifat hukum diatas ternyata kepatuhan yang bersifat *internalization*lah yang dinilai mampu membawa pada efektifitas hukum, karena kesadaran terhadap hukum di dorong oleh kesadaran dalam diri untuk mentaati sebuah aturan.

D. Masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat merupakan kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batasan-batasannya. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab '*syaraka*' yang artinya ikut serta atau partisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah '*society*' yang berasal dari kata '*socius*' yang berarti kawan atau teman.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para

warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekwensi yang tinggi.

Adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari kelompok manusia itu saling berinteraksi. Sebaliknya, bila hanya adanya suatu potensi untuk berinteraksi saja belum berarti bahwa warga dari suatu kesatuan manusia itu benar-benar akan berinteraksi. Hendaknya diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau yang berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Sekumpulan orang yang mengerumuni seorang tukang penjual jamu di pinggir jalan tidak dapat disebut sebagai suatu masyarakat. Meskipun kadang-kadang mereka juga berinteraksi secara terbatas, mereka tidak mempunyai suatu ikatan lain kecuali ikatan berupa perhatian terhadap penjual jamu tadi. Untuk sekumpulan manusia itu dipakai istilah kerumunan yang dalam bahasa Inggris telah dipakai istilah *crowd*.

Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Lagi pula, pola ini harus bersifat mantap dan kontinyu, dengan perkataan lain pola khas itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas. Dengan demikian, suatu asrama pelajar, suatu akademi kedinasan, atau suatu sekolah, tidak dapat kita sebut masyarakat, karena meskipun kesatuan manusia yang

terdiri dari murid, guru, pegawai administrasi, serta para kariawan lain itu terikat dan diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma dan aturan sekolah dan lain-lain, namun sistem normanya hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas saja. Sedangkan sebagai kesatuan manusia, suatu asrama atau sekolah itu hanya bersifat sementara, artinya tidak ada kontinuitasnya.

Selain ikatan adat istiadat yang meliputi sektor kehidupan dan kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan- kesatuan manusia lainnya. Ciri ini memang dimiliki oleh penghuni suatu asrama atau anggota suatu sekolah. Akan tetapi tidak adanya sistem norma yang menyeluruh dan tidak adanya kontinuitas, menyebabkan penghuni suatu asrama atau murid suatu sekolah tidak bisa disebut masyarakat.

Sebaliknya suatu Negara, suatu kota, atau desa, misalnya merupakan kesatuan manusia yang memiliki keempat ciri terurai diatas, yaitu (1)interaksi antara warga-warganya, (2)adat-istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga Negara kota atau desa, (3)kontinuitas waktu, (4)rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Itulah sebabnya suatu Negara, kota atau desa dapat disebut masyarakat.

Setelah uraian diatas, sekarang tiba waktunya untuk merumuskan suatu definisi mengenai konsep masyarakat untuk keperluan analisis. Dengan memperhatikan ketiga ciri terurai sebelumnya maka definisi mengenai masyarakat secara khusus dapat dirumuskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut djodigono dalam bukunya Azas-azas Sosiologi (seperti dikutip Koentjaraningrat, 2009: 119), membedakan antara konsep masyarakat dalam arti yang luas dan sempit. Misalnya masyarakat Indonesia sebagai contoh suatu masyarakat dalam arti luas. Sebaliknya masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti marga atau suku, dianggap sebagai contoh dari suatu masyarakat dalam arti sempit. Istilah masyarakat adalah istilah umum bagi satu kesatuan hidup manusia dan karena itulah bersifat lebih luas. Masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat dan rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009: 120)

Aristoteles mengemukakan bahwa manusia merupakan *zoon politicon*, artinya makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama dari pada hidup tersendiri (Lukman, 2007:11). Menurut kamus besar

bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas dan menjadi faktor utamanya adalah adanya hubungan yang kuat diantara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya.

Dalam hal ini masyarakat juga dapat diartikan sebagai golongan kecil ataupun besar yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat adanya masyarakat bukan masalah jumlah orangnya melainkan juga harus ada pertalian satu sama lain. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai konsep masyarakat, antarlain yaitu:

Menurut Horton dalam M. Zaini Hasan dkk (1996: 12-13) berpendapat bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktifitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. Lebih lanjut Horton dalam M. Zaini Hasan dkk (1996: 247), bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur

kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan rasa saling memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur.

Menurut Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko, (1984:11), bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggotanya.

Menurut Maciver (1999: 127), masyarakat adalah satu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lainnya, sistem dan pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.

Menurut Emile Durkheim dalam Djuretna Imam Muhni, (1994: 29-31), keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia.

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang didalamnya ada beberapa unsur-unsur antara lain yaitu (1)masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, (2)bercampur untuk waktu yang cukup lama, (3)mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, (4)mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Dari pendapat beberapa ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari masyarakat yaitu sekelompok manusia yang hidupnya saling berdampingan dalam mendiami suatu wilayah serta saling bergaul dan memiliki kebudayaan dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggotanya sehingga mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama untuk waktu yang cukup lama.

BAB III

KONSEP PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN USIA DINI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal untuk bisa terbentuknya kehidupan berkeluarga yang akan menjadikan cikal bakal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Diciptakannya laki-laki dan perempuan secara alamiah akan memiliki daya tarik-menarik satu sama lain, untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama dengan membuat ikatan lahir batin guna mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Pengertian menikah secara bahasa berasal dari kata an- nikah yang memiliki arti cukup unik, karena mempunyai dua makna sekaligus yang pertama Jimak atau al-wath'‘u yaitu hubungan seksual atau hubungan badan, sedangkan yang kedua Akad atau al-„aqdu, artinya adalah sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami-istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihisalam, kecuali diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami-istri dalam ikatan pernikahan.

Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup dipermukaan bola bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata (Sarwat, 2019: 7-8).

Menurut Subekti (1984:231), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan juga dapat didefinisikan sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan tidak hanya sekedar hubungan mempelai pria dan wanita saja, melainkan juga menyangkut orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

Pernikahan merupakan perintah agama untuk para Nabi dan Rasul-Nya, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

“Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan suatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.(QS. Ar-Rad: 38)

Yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi yang baik satu sama lain. Begitu pentingnya arti perkawinan tersebut sehingga Negara hadir untuk merumuskan sebuah aturan Perkawinan yaitu dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri sebelum mengarungi rumah tangga.

Selain dipandang dari segi agama pernikahan atau perkawinan juga bisa diartikan dari segi ilmu. Berikut ini adalah pengertian pernikahan menurut para ahli yang didalamnya juga memuat mengenai perkawinan.

Menurut Thoha Nasrudin (1976), pernikahan adalah persetujuan antara calon suami dan calon istri karena berlangsungnya melalui ijab qobul atau serah terima. Apabila suatu akad telah dilaksanakan, maka artinya mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, bersedia hidup semati dalam mengarungi rumah tangganya.

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut ihsan (2008), pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

Berdasarkan berbagai macam pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan atau pertalian yang suci, agung dan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi agar bisa melanjutkan keturunannya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut perundang-undangan yang berlaku.

1. Pernikahan Menurut Islam

Agama islam memandang bahwa pernikahan merupakan salah satu hal yang luhur dan sakral. Dalam artian menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rosulullah serta dilaksanakan atas dasar keihlasan, tanggung jawab dan memiliki ketentuan-ketentuan hukum. Yang harus diindahkan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 yaitu tentang

Perkawinan yang ada pada bab 1 pasal 1 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasakan tentram kepadanya dan Dia menjadikan diataramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir”* (QS. Ar-Rum: 21).

Mawaddah warahmah merupakan anugrah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melaksanakan pernikahan. Pernikahan juga merupakan sunah Nabi Muhammad SAW, di dalam hadits Nabi SAW disebutkan bahwa menikah itu bagian dari sunah. Sebagaimana sabda beliau:

Artinya: *“Menikah itu bagian dari sunahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunahku, bukanlah ia dari golonganku”* (HR. Ibnu Majah).

Sunah dalam artian mencotoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW Perkawinan diisyaratkan supaya manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah dan halal untuk menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta, kasih dan ridhonya Allah SWT Hal yang demikian telah diisyaratkan sejak dahulu dan sudah banyak sekali di jelaskan dalam Al-Quran,

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui” (QS. An Nur: 32).*

Dalam islam, rukun dan syarat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kebanyakan dari setiap aktifitas ibadah dalam agama islam senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat, sehingga dapat dibedakan dari pengertian keduanya. Syarat yang merupakan suatu hal yang harus ada dan terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau terpenuhi pada saat perbuatan dilaksanakan. Kaitanya dengan perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti harus adanya

calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, akad nikah dan saksi. Semua itu adalah bagian dari hakikat perkawinan dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada salah satu dari rukun perkawinan diatas.

Adapun syarat merupakan suatu yang mesti ada dalam perkawinan dan merupakan salah satu bagian hakikat perkawinan. Misalnya saja syarat untuk menjadi wali harus laki-laki, baliq, berakal (tidak gila), seorang muslin, dan harus adil, ini menjadi penting karena selain menjadi saksi pernikahan, seorang wali nikah mempunyai posisi atau memiliki hak penuh untuk menijinkan kedua mempelai itu boleh menikah atau tidak.

Para ulama sepakat bahwa rukun dan syarat perkawinan itu terdiri dari beberapa bagian, seperti:

1) Rukun Pernikahan

- a) Adanya calon suami
- b) Adanya calon istri
- c) Adanya wali dari pihak calon istri
- d) Adanya dua orang saksi, akad nikah dianggap sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- e) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

2. Ketentuan Pernikahan Menurut UUP No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Menkumham Tjahjoe Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah. ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

- 4) Ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon memepelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (1992:18) BAB II pasal 5 dan pasal 6, yang berisi tentang dasar-dasar perkawinan adalah calon suami, calon istri , wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut ada pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 22 Tahun 1954.

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Hakikat Pernikahan Usia Dini

1. Penetapan Minimal Usia Pernikahan

Salah satu aspek terpenting dalam hal pernikahan adalah mengenai batas usia. Batas usia harus diperhatikan, karena siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan maka kematangan usia, kedewasaan, kesiapan mental dan fisik dapat memberikan pengaruh pada hubungan keluarga yang akan dibina dalam sebuah keluarga. Sayyid Sabiq berpendapat sebagaimana dikutip sebuah buku yang berjudul *Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan* yang ditulis Andi Syamsu Alam bahwa “Kesiapan mental dan fisik tidak ditentukan oleh faktor usia akan tetapi oleh kematangan psikologis kedua pasangan sehingga keduanya dapat memahami tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Sabiq juga berpendapat bahwa, kemampuan untuk menikah ditentukan oleh aspek kejiwaan, kesiapan sosial dan ekonomi (Andi Syamsu, 2005: 42).

Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat

(1) menjelaskan bahwa: perkawinan hanya diijinkan bagi para calon yang sudah berusia 19 Tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut para imam madzhab sepakat bahwa yang menjadi toalk ukur bisa melakukan pernikahan adalah usia baliq kedua mempelai. Usia baliq untuk perempuan bisa dibuktikan dengan haid dan ikhtilam untuk laki-laki. Sedangkan menurut syapii dan Hambali

batas usia balik yaitu pada saat berusia 15 Tahun baik laki-laki dan perempuan.

2. Konsep Teori Pernikahan Usia Dini

Usia remaja adalah periode transisi atau sedang mengalami masa peralihan. Tidak ada satupun anak laki-laki ataupun anak perempuan yang tidak mengalami masa remaja. Menurut Derajat (AL-Ghifari, 2004:24) “Remaja merupakan anak yang dalam masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa dan mengalami perubahan-perubahan yang cepat dalam segala hal diberbagai bidang. Maksudnya adalah mereka bukan lagi anak, baik dalam bentuk badan, sikap, dan cara berpikir serta bertindak, tapi bukan pula sebagai orang dewasa yang telah matang”.

Secara sederhana pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan diusia yang masih muda oleh perempuan dan laki-laki yang umurnya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita dan pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun.

Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini juga menyatakan untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin

dari kedua orang tua. Sama halnya dengan penjelasan dalam UU Republik Indonesia No. 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan diusia dini adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri diusia yang masih muda atau remaja. Berkaitan dengan pernikahan dini, yang dimaksud dengan golongan remaja muda dilihat dari rentangan usianya adalah para laki-laki dan para gadis yang berusia 14 (empat belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

Banyak orang tua di pedesaan yang masih belum mengerti arti kedewasaan seorang anak. Kebanyakan dari mereka masih beranggapan bahwa apabila anak perempuan mereka telah mengalami perubahan bentuk badan yang terlihat signifikan maka harus segera dinikahkan. Walaupun telah dijelaskan dalam UU pernikahan tentang batas usia anak aturan untuk dapat melangsungkan pernikahan, tetapi pada kenyataannya masih banyak orang tua di Kampung Medang yang menikahkan anak perempuannya pada usia 14(empat belas) - 18 (delapan belas) tahun tanpa melihat kematangan psikologis anak. Hal

demikian juga dipengaruhi oleh sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Jayadiningrat (dalam Suparman, 2000: 45) menyatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan diusia muda karena tidak fahamnya mengenai pernikahan dan kepercayaan mempertahankan tradisi budaya yang berkembang dimasyarakat masih kuat, sehingga akibatnya pernikahan anak perempuan diusia muda masih berlangsung.

Biasanya di desa masih banyak tradisi menikah usia muda, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pernikahan diusia muda serta dampaknya terhadap pendidikan anak. Pada umumnya orang tua di pedesaan masih percaya dengan tradisi budaya leluhur nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. Biasanya orang tua dipedesaan masih beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah samapi tinggi. Menurut mereka pendidikan yang paling penting adalah anak bisa baca, tulis dan hitung itu sudah dianggap cukup. Tanpa mempertimbangkan usia anak, bagi orang tua dipedesaan yang terpenting sudah bisa memasak dan dianggap bisa mengurus suami setelah itu anak perempuan sudah bisa menikah. Mereka beranggapan meskipun pendidikan anak perempuan mereka tinggi toh pada akhirnya akan kembali ke dapur juga.

Persepsi itulah yang memberikan dorongan kepada orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan alasan takut kalau anaknya menjadi perawan tua. Pandangan orang tua mengenai anak perempuan yang tidak segera menikah ini membuat anak merasa terkucilkan, karena perbedaan status yang disandang antara mereka yang sudah menikah dengan mereka yang belum menikah. Selain lingkungan yang dapat memberikan pengaruh, ternyata adat, tradisi dan budaya setempat juga sangat berperan. Para orang tua dipedesaan beranggapan jika anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka hanya akan menjadi beban mental bagi orang tua saja.

3. Akibat Pernikahan Dini

Berbagai dampak pernikahan dini terhadap hukum adanya pelanggaran terhadap undang-undang di Negara kita, yaitu:

- a. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diijinkan jika semua pihak (laki-laki dan perempuan) sudah mencapai umur 19 Tahun. Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya.
- b. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- 3) Mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat UU diatas bertujuan untuk melindungi anak, agar anak dapat memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kasus perkawinan dibawah umur dinilai sebagian kalangan merupakan salah satu contoh kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dampak perkawinan usia dini antara lain:

1) Dampak Biologis

Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

2) Dampak Psikologis

Pasangan pelaku pernikahan dini belum mampu hak dan kewajibanya sebagai pasangan suami istri secara maksimal, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

3) Dampak Sosial

Dampak sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender. Budaya ini menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Pada kondisi seperti ini akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4) Dampak Pendidikan

Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain, hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

5) Dampak Kesehatan

Wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun, akan beresiko mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga yang melahirkan bayi yang premature.

Berdasarkan beberapa dampak diatas, maka dapat disimpulkan jika perkawinan dibawah umur dapat memberikan dampak yang serius bagi kehidupan anak baik saat ini ataupun dikemudian hari.

4. Hubungan Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Suatu pernikahan secara tidak langsung mampu membelenggu kebebasan seseorang, alasanya karena didalam

pernikahan terdapat tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dibinanya. Hal demikianlah yang dinilai menjadi pertimbangan yang signifikan untuk seseorang mengambil keputusan untuk menikah. Pendidikan menjadi salah satu variable yang dijadikan pertimbangan yang mengaburkan keputusan untuk menikah, terlebih lagi untuk menikah diusia dini.

Implikasi pendidikan berdasarkan pendapat Freud: "Pendidikan merupakan sesuatu untuk memperhalus dan membudayakan dorongan-dorongan kelamin sesuai dengan harapan masyarakat". Hal ini dapat diartikan memperdalam ilmu dalam dunia pendidikan sering kali membuat orang melupakan kehidupan pribadinya. Maka dari itu kebanyakan orang tidak memikirkan kebutuhan biologisnya dikarenakan kesibukaanya.

Tingkat pendidikan yang tinggi mampu memberikan pemahaman secara matang pada individu untuk mengambil keputusan. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk menimpa dirinya kibat keputusan yang telah diambil. Kalau pernikahan dilaksanakan dibawah usia 20 tahun, maka secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya.

Kurangnya tingkat pendidikan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, dari faktor ekonomi inilah seseorang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya dan bisa juga dikarenakan oleh keluarga

yang relatif besar. Selain itu faktor sosial budaya juga mampu mempengaruhi kurangnya tingkat pendidikan seseorang, mungkin pendidikan masyarakat dilingkungan sekitar yang tergolong rendah dapat menyebabkan para remaja untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Usia perkawinan di pedesaan lebih muda dari pada di kota (Dellyana, 1988). Pernikahan di usia dini yang ada di desa biasaya disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Menurut David Popenoe dalam Abu Ahmadi (1991: 182), fungsi pendidikan adalah (a)trasmisi kebudayaan, (b)menolong individu memilih dan melakukan peranan sosial, (c)Menjamin integrasi sosial, (d)Sebagai inovasi sosial.

Tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk mengambil suatu keputusan. Individu tersebut tidak menginginkan jika suatu hal yang buruk menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah ia ambil.

Dampak yang mungkin ditimbulkan akibat pernikahan diusia dini sangat bermacam-macam. Pada awalnya mungkin secara fisik anak lebih cepat matang dan dewasa, tetapi pada segi psikis, ekonomi, sosial maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu untuk membangun yang namanya keluarga yang sejahtera, hal ini disebabkan karena emosi remaja yang belum stabil, maka dinilai

belum mampu menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Selain itu, karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya ketrampilan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan dan hal yang demikian berpengaruh pada tingkat pendapatan keluarga.

Dalam kajian di buku ini yang menjadi masalah adalah penyimpangan sosial karena adanya pernikahan dini, karena pada dasarnya pernikahan dibawah umur banyak memberikan dampak yang tidak baik. Dalam pernikahan dibawah umur permasalahan yang timbul adalah kesiapan pasangan yang menikah dibawah umur dalam membina rumah tangga dan mencukupi kebutuhannya, pasangan yang belum memiliki kesiapan secara fisik, mental dan materi tentu menambah permasalahan yang hanya akan menjadi beban.

Sedangkan budaya hukum merupakan penggerak perilaku hukum dalam suatu kelompok masyarakat. budaya hukum sendiri bisa berjalan dengan baik karena didasari oleh kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dapat terlaksana karena adanya pengetahuan hukum, mengenai aturan-aturan hukum yang terlihat dalam perilaku hukum. Budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh tipologi masyarakatnya.

BAB IV

BUDAYA HUKUM DAN PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI DI MASYARAKAT

A. Gambaran Umum di Kampung Medang

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh penulis. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang yang perlu diketahui penulis adalah kondisi geografis, demografis yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan gambaran subyek penelitian.

1. Keadaan Geografis

1) Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kampung Medang Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Letak koordinat Desa Sukamulya berada pada 106.635349 BT - 6.380762 LS. Terletak pada ketinggian 86 m DPL mengakibatkan Desa Sukamulya termasuk pada wilayah dataran rendah, yang rata-rata suhunya berkisar 28⁰C-38⁰C. Dengan dianugrahi kondisi wilayah yang demikian, maka kegiatan masyarakat daerah setempat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya

antara lain adalah beternak, berkebun, kegiatan industri dan sentra-sentra bisnis lainnya.

Khusus lokasi yang digunakan untuk penelitian mayoritas lahan di Kampung Medang dimanfaatkan untuk pemukiman, usaha peternakan ayam dan lahan kosong (kebun bambu). Karena kondisi jalan di pemukiman rusak dan belum ada perbaikan secara menyeluruh, maka transportasi warga biasanya menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan transportasi yang biasanya digunakan warga adalah kendaraan bermotor (ojek). Karena jarak antara kampung ke kota cukup jauh, sehingga Kampung Medang termasuk dalam wilayah pedesaan. Berikut tabel jarak tempuh dari desa ke kota:

Tabel 4.1

Jarak dari desa ke kota

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Ds. Sukamulya ke Kec. Rumpin	12 Km	45 Menit
2.	Dari Ds. Sukamulya ke Kab. Bogor	49 Km	120 Menit
3.	Dari Ds. Sukamulya ke Provinsi	184 Km	180 Menit

(Sumber: Profil Desa Sukamulya)

2) Batas Desa

Desa Sukamulya bertetangga atau berbatasan dengan desa lain yang masih dalam satu kecamatan. Berikut tabel batas wilayah Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin:

Tabel 4.2

Batas Wilayah Desa Sukamulya

No.	Batas Wilayah Desa/ Kelurahan
-----	-------------------------------

1.	Sebelah Utara Suradita
----	------------------------

2.	Sebelah Selatan Taman Sari
----	----------------------------

3.	Sebelah Timur Gunung Sindur
----	-----------------------------

4.	Sebelah Barat Mekarsari
----	-------------------------

(Sumber: Profil Desa Sukamulya)

Fokus lokasi penelitian dilaksanakan di Kampung Medang RW. 08 yang diketuai oleh Bp. Zaenal Abidin. Secara geografis Kampung Medang memiliki luas sekitar 60 Ha dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kampung Anamui, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Wiranji, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Cikoleang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Keranggan.

1) Luas Desa

Desa Sukamulya memiliki luas tanah secara keseluruhan 1.070 Ha. Berikut penjelasan luas desa melalui tabel tataguna lahan Desa *Sukamulya Kecamatan Rumpin*:

Tabel 4.3

Tataguna Lahan Desa Sukamulya

No.	Tata Guna Lahan	Luas
1.	Sawah	197 Ha
2.	Tegal/Ladang	101 Ha
3.	Pemukiman	420 Ha
4.	Pekarangan	182 Ha
5.	Tanah rawa	38 Ha
6.	Pasang surut	78 Ha
7.	Situ/Waduk/Danau	116 Ha

(Sumber: Profil Desa Sukamulya)

Desa Sukamulya dipimpin oleh kepala desa yang bernama H. Sarkoni dan mempunyai Sekretaris desa bernama Bp. Ihwan Nur Arifin. Dalam pemerintahanya kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti Sekdes, Kesra, dan Seksi desa lainnya. Desa Sukamulya terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 47 Rukun Tetangga (RT). Berikut disajikan dalam bentuk tabel, jumlah RW dan RT yang ada di Desa Sukamulya.

Tabel 4.4

Jumlah RW dan RT Desa Sukamulya

No.	Nama Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
No.	Nama Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1.	RW 01	6 RT
2.	RW 02	8 RT
3.	RW 03	3 RT
4.	RW 04	11 RT
5.	RW 05	7 RT
6.	RW 06	6 RT
7.	RW 07	3 RT
8.	RW 08	3 RT
	Jumlah Total	47 RT

(Sumber : Data dari Kantor Desa Sukamulya, 24 Juli 2020)

2. Keadaan Demografis**1) Penduduk**

Kampung Medang memiliki 224 kepala keluarga dan 705 jiwa yang tersebar di 3 RT. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk RW.08 Berdasarkan Pengelompokan Rukun Tetangga (RT)

Nama RT	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Jiwa
---------	-----------------------------	-------------

RT. 01	62	206
RT. 02	93	279
RT. 03	69	220
Jumlah Total	224 KK	705 Jiwa

(Sumber : Data Ketua RW. 08 Kampung Medang, 23 Juli 2020)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa komposisi jumlah Kepala Keluarga terbanyak terdapat di RT.02 yaitu 93 KK dengan jumlah penduduk 279 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga terendah terdapat di RT. 01 yaitu terdapat 62 KK dengan jumlah penduduk 206 jiwa.

Penduduk Kampung Medang terdiri dari penduduk asli suku sunda dan pendatang mayoritas suku jawa dan lampung. Sampai bulan Juli tahun 2020 jumlah penduduk di Kampung Medang adalah 705 jiwa, terdiri dari 53% penduduk laki-laki dan 47% penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Kampung Medang Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	374	53%
2.	Perempuan	331	47%
	Jumlah Total	705 jiwa	100%

(Sumber : Data Ketua RW. 08 Kampung Medang, 23 Juli 2020)

Kampung Medang yang luas keseluruhanya 60 Ha, terbagi menjadi beberapa bagian. Kampung tersebut dihuni oleh sekitar 705 jiwa, yang terdiri dari 374 jiwa laki-laki dan 331 jiwa perempuan. Dengan demikian

jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk jenis kelamin perempuan dengan selisih 43 jiwa.

2) Mata Pencapaian

Kampung Medang yang dihuni oleh 705 jiwa secara keseluruhan masyarakatnya bermata pencapaian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai buruh srabutan kasar. Adapun untuk masyarakat yang lain bermata pencapaian sebagai PNS, buruh pabrik, pedagang dan tukang ojek.

Berikut disajikan tabel mengenai jumlah penduduk Kampung Medang Desa Sukamulya, menurut mata pencapaian.

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian	Jumlah	%
1.	PNS	2	1%
2.	Buruh Pabrik	31	18%
3.	Srabutan kasar	63	38%
4.	Dagang	42	25%
5.	Tukang Ojek	30	18%
	Jumlah Total	168	100%

(Sumber : Data Ketua RW. 08 Kampung Medang, 23 Juli 2020)

Warga Kampung Medang secara keseluruhan bermata pencapaian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai buruh srabutan kasar

yaitu ada sekitar 38%, adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS ada 1%, buruh pabrik ada 18%, dagang ada 25%, dan tukang ojek ada 18%.

3) Tingkat Pendidikan

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Dengan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, diharapkan akan semakin berkualitas pula sumber daya manusianya. Berikut tabel jumlah penduduk Kampung Medang menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Sarjana	9	1%
2.	Diploma	1	0,1%
3.	SLTA/Sederajat	78	11%
4.	SLTP/Sederajat	106	15%
5.	SD/Sederajat	204	29%
6.	Tidak tamat SD	149	21%
7.	Tidak Sekolah	158	23%
	Jumlah Total	705	100%

(Sumber : Data Ketua RW. 08 Kampung Medang, 23 Juli 2020)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang samapai lulus perguruan tinggi dan sarjana yaitu ada 1%, tamat SLTA/Sederajad yaitu ada 11%, tamat SLTP/Sederajad yaitu ada 15%, tamat SD/Sederajad yaitu ada 29%, Tidak tamat SD yaitu ada 21% dan sisanya adalah penduduk yang tidak sekolah yaitu ada 23%. Dari data tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan warga Kampung Medang masih tergolong rendah.

4) Agama

Walaupun di Indonesia banyak beragam agama dan ada jaminan untuk setiap warga Negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi warga Kampung Medang semuanya memeluk agama Islam, tidak ada satupun warganya yang memeluk agama lain selain agama Islam. Hal demikian dikuatkan dengan perkataan Bp. Zaenal Abidin selaku RW. 08, beliau berkata, *"Semua warga Kampung Medang mayoritas beragama islam, di Medang tidak ada agama lain selain agama Islam. Jadi semua warga saya agamanya Islam"* (Abidin, wawancara: Kamis, 23 juli 2020).

5) Kesehatan

Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, terutama dekatnya kandang-kandang ternak dengan rumah mereka akan menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit pernafasan. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, di Kampung Medang terdapat seorang bidan desa dan pegawai puskesmas yang bertugas untuk

mengontrol kesehatan masyarakat dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menyadarkan masyarakat yang kurang mengetahui tentang kesehatan, bidan desa dan pegawai puskesmas memberikan penyuluhan kepada penduduk akan pentingnya kesehatan bagi kehidupan masyarakat. Biasanya penyuluhan kesehatan dilaksanakan bersamaan dengan berlangsungnya jadwal posyandu, biasanya dilaksanakan sebulan sekali dan bertempat di rumah ketua RW08. Sebagaimana penyampaian Bp. Zaenal Abidin dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Sebenarnya daerah sini jauh tertinggal dengan sebelah (kp. Anamui, Tangerang), bantuan korona gk dapat masa disini 1 RT cuma orang 4 yang dapat, di saya ada 3 RT. Cuma 12 orang yang dapat, apalagi dengan kesehatan?? Ni ya mbak.... Semua kegiatan kesehatan itu dari bidan sama orang puskesmas datangnya kerumah saya kalo ada jadwal POSYANDU biasanya sama suntik imunisasi anak bayi, alhamdulillah sih sebulan sekali datangnya biasanya kalo kesini tiap tanggal 12, ya... sama ngasih-ngasih kue kalo gak pisan gitulah buat gizi,” (Abidin, wawancara: Kamis 23 juli 2020).

6) Sarana dan prasarana

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat seperti sarana peribadatan berupa masjid ada 1, mushola ada 1. Sarana pendidikan seperti Taman Kanak-kanak (TK) ada 1, Sekolah Dasar Negeri (SD) ada 1, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP) ada 1, Sekolah Menengah Atas Swasta (SMA) ada 1. Sarana lain berupa sarana kesehatan seperti POSYANDAU dan sarana olah raga seperti lapangan bola, lapangan bulu tangkis dan lainnya bertempat di

wilayah pribadi salah satu warga masyarakat (hasil obserfasi lapangan oleh peneliti).

3. Gambaran Subyek Penelitian

Untuk menunjang penelitian yang dilakukan mengenai budaya hukum pernikahan usia dini di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor supaya hasilnya berkualitas. Maka peneliti membutuhkan objek untuk diteliti. dimana peneliti mengambil sembilan (9) sampel responden informan dari masyarakat yang terdiri dari tiga (3) orang informan sebagai pelaku pernikahan usia dini, dua (2) orang informan sebagai orang tua pelaku pernikahan usia dini, tiga (3) orang informan sebagai tokoh masyarakat dan satu (1) orang informan sebagai perwakilan dari perangkat desa. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang mendalam kepada informan dengan tujuan supaya lebih mudah mengetahui budaya hukum masyarakat khususnya mengenai praktik pernikahan usia dini. Penelitian yang saya lakukan berada di RW.08 yang mana terdiri dari tiga (3) RT.

Untuk mendapatkan informasi, penelitian dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung ke rumah masing-masing informan guna menggali data yang diperlukan. Pada saat pencarian informasi di lapangan ternyata tidak mudah, dalam proses penelitian ada beberapa hambatan yang dijumpai oleh peneliti, antara lain seperti ada yang malu-malu untuk menceritakan kisahnya, ada pula respon negatif dari masyarakat maupun tokoh masyarakat, bahkan beberapa penolakan wawancara dari keluarga pelaku nikah usia dini, serta sulitnya menemui perangkat desa dan masih banyak lainnya.

Adapun salah satu permasalahan yang ditemukan, hampir sebagian besar pelaku nikah diusia dini adalah perempuan yang rata-rata putus sekolah saat berada di bangku SMA. Sebagaimana pernyataan dari pelaku nikah usia dini saat di wawancara, *"Saya nikah umur 17 th, pas itu mau naik kelas 2 SMA"* (Putri, wawancara: Kamis 23 Juli 2020). Hal ini sama seperti yang di sampaikan oleh Tokoh Agama Kampung Medang, seperti berikut ini:

"Pelakunya itu biasanya SMP umur 14th-16th , kadang-kadang kayak kemarin itu 17th udah SMA dia....., itu kebanyakan perempuan, seperti yang saya bilang kalo orang dari kiayi kalo anaknya perempuan tidak mengharuskan anaknya usia sekian sampe sekian kalo misalnya sudah ada yang meminang langsung aja dinikahkan, kebanyakan seperti itu" (Zen, wawancara: Rabu, 22 Juli 2020).

Permasalahan yang selanjutnya jika dilihat dari kemandirian segi ekonomi pasangan pelaku nikah usia dini suaminya rata-rata tidak bekerja atau pengangguran, dan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari para pelaku nikah usia dini ini masih mengandalkan bantuan dari orang tuanya. Seperti penuturan wawancara dengan Ketua RW.08 :

"Ada beberapa dari mereka yang lakinya bekerja jadi buruh srabutan, tetapi mayoritas di sini para suami pelaku nikah dini tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai santri, yang kesehariannya mengaji di kobong-kobong." (Abidin, wawancara: Kamis, 23 juli 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dan keterangan dari beberapa informan, mereka para suami kebanyakan berprofesi sebagai santri (mengkaji ilmu agama islam) dan istri sebagai ibu rumah tangga. Tidak ada kegiatan atau pekerjaan lain yang terlihat dilakukan oleh para pelaku nikah

usia dini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tokoh Agama selaku amil di Kampung Medang,

“Sebagian ada yang sudah kerja walaupun hanya sebagai supir atau kerja ditenak-ternak juga ada. Terus ada juga yang istilahnya pengangguran, sama sekali gak kerja kayak seperti e...santri, saya bilang tadi kayak kemarin tuh sebelum lebaran bulan puasa ada tuh yang menikah 2 orang, itu yang menikah laki-lakinya santri sampai sekarang dia gak kerja.

Kalau dari kesehariannya jadi e... karna orang tua si perempuan lebih mengutamakan asal dia (suami) mau mengajarkan ngaji sama anak-anak yang lain menyiarkan agama, istilahnya untuk ekonominya kedua orang tua ini selalu membantu. Jadi orang tua silaki-laki dan orang tua si perempuan itu selalu membantu, jadi istilahnya tetep aja perharinya untuk belanja mereka disisihkan dari pendapatan orang tuanya malah seperti itu” (Zen, wawancara: Rabu, 22 Juli 2020).

B. Gambaran Umum Budaya Hukum Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini

Secara umum masyarakat di Kampung Medang tergolong masyarakat yang agamis karena sangat berpegang teguh pada hukum syariat agama Islam. Di Kampung Medang nilai dan norma Islam adalah pondasi yang digunakan warga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pengaruh tokoh agama seperti Kiai, Ulama, Ustadz, sesepuh agama sangat berpengaruh kuat dalam membangun karakter budaya hukum masyarakat yang berbasis Islam. Hal inilah yang peneliti anggap mempengaruhi masyarakat kurang paham terhadap aturan hukum perundang-undangan dari pemerintah, yang terkadang oleh masyarakat dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh Tokoh Agama di Kampung Medang mengenai tanggapan terhadap undang-

undang perkawinan terkait dengan larangan pernikahan diusia dini, yaitu sebagai berikut:

“UU peraturan perkawinan kenegaraan ya? Terkait pernikahan Sebenarnya menurut saya pribadi, ini termasuk banyak yang istilahnya menzolimlah sama orang islam, kalo menurut pribadi saya. Karena kalo dari ketentuan islam itu yang harus dijaga diutamakan jangan sampai orang tersebut melakukan zina diluar nikah kan itu pokok utama yang paling saya jalankan . cuman kalo istilahnya sudah selama sekian sudah saling suka saling cinta itukan yang direpotkan yang diresahkan. Cuman ya itu kewenangan negara untuk mengatur istilahnya dari segi kesehatan yang dirisaukan sama perekonomian belum mapan begitu.” (Zen, wawancara: Rabu, 22 Juli 2020).

Pola pemikiran masyarakat seperti ini masih bisa kita temukan didaerah yang kuat akan syariat Islamnya, salah satu contohnya adalah di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Bisa jadi hal demikian yang melatarbelakangi masih rendahnya budaya sadar hukum positif yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dikarenakan kentalnya hukum syariat Islam yang masyarakat gunakan dalam menjalani kehidupan, sebagaimana penjelasan yang diungkapkan oleh Ketua RW 08 berikut ini:

“Masyarakat kita patokan, peganganya itukan agama, jadi gak mengacu ke undang-undang..! Kemarinkan ada yang nikah sirih, jaro (RW) yang bikin surat pernyataan , takutnya dia mau ngontrak atau apa? Kan dia buat surat keterangan kalo bener kedua orang ini sudah sah suami istri, distempel disaksikan ketua RW segala macem tetek bengeknya gitu. Kalau tanggapan undang-undang perkawinan kalo saya sih gak setuju, karena apa? gak setujunya kenapa? Karenakan takutnya yang namanya pacaran. Kan kalau kita melarangpun kita gak bisa. Bisa kita melarang kalo lagi dirumah, kalo dikeluarkan kita gak bisa apa-apa? Gitu, makanya kalo memang kelihatan kearah sana ya udah, yang penting ada umur 17 langsung aja udah, dari padakan ntar suka lah.... Hamil malah jadi beban kan gitu, kebanyakannya

disitu, kalo misalkan diwilayah-wilayah daerah sinimah gitu”
(Abidin, wawancara: Kamis, 23 Juli 2020).

Sejauh ini penilaian masyarakat terhadap aturan Undang-Undang terkesan memberatkan masyarakat, sehingga banyak dari mereka yang tidak mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Misalnya instruksi pemerintah kepada setiap warga negaranya supaya membuat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah dan kelengkapan administrasi lainnya sebagai pegangan warga Negara juga tidak terlalu di indahkan. Akibatnya mereka selalu kesusahan jika berhubungan dengan data administrasi kenegaraan. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan program kesejahteraan rakyat yang bertujuan memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya, Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu program bantuan berupa uang dari pemerintah baik dilembaga formal maupun non formal bagi anak-anak dari kalangan keluarga yang kurang mampu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, dan terkadang apabila mereka sakit di rumah sakit sangat kesulitan untuk mengurus administrasi melalui jalur BPJS. Sebagaimana kutipan wawancara bersama Staf Desa Sukamulya berikut:

“Kalau untuk berfikir kenegaraan sih ya saya setuju, karena emang diakhirnya itu akan ada efek yang menyulitkan bagi orang yang melakukan pernikahan diusia dini. Contoh tadi itu dia tidak punya pendataan di kenegaraan kan?? Tidak punya

buku nikah mau mengurus surat apa-apapun jadi susah karena umurnya belum cukup. Dia tidak bisa mendapatkan buku nikah sedangkan buku nikah itu penting untuk saat inikan. Untuk data keseluruhan baik buat dia pribadi, suami istri atau anak-anaknya nanti ketika akan mengurus keperdataan di Sekolah, di BPJS, dimanapun itu buku nikah itu kan diperlukan. ” (Suheri, wawancara: Jum’at, 24 Juli 2020).

Hal yang demikian juga tidak ada bedanya dengan aturan pemerintah dalam aturan Perkawinan. Praktik nikah usia dini di Kampung Medang sampai sekarang masih sering dijumpai dan dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa saja oleh masyarakatnya. Seperti yang disampaikan oleh orang tua pelaku nikah dini, *“Lingkungan sini ma biasa aj, karena udah banyak kan disini yang menikah di usia dini”* (Samsiah, wawancara: Kamis, 23 Juli 2020).

Dalam kasus pernikahan di usia dini, banyak beragam alasan yang diberikan oleh masyarakat antara lain yaitu :

- a. Ribet, dalam hal mengurus perijinan dispensasi nikah jika berkaitan dengan umur calon pengantin yang masih kurang, karena dalam mengurusnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan proses waktu yang tidak sebentar.
- b. Menjaga pergaulan anak supaya tidak melanggar hukum syariat Islam.
- c. Menghindarkan anak dari perbuatan zina
- d. Yang terpenting suatu pernikahan itu sah sesuai syariat agama islam, sehingga tidak ada yang perlu dikuawatirkan.

Demikianlah beberapa alasan masyarakat yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian dilapangan. Dari beragamnya alasan masyarakat diatas bisa dipahami bahwa secara tidak langsung budaya hukum masyarakat di

Kampung Medang dibangun oleh paradigma agamis agama islam yang mereka anut. Sehingga budaya sadar hukum positif masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ini dipengaruhi karena mereka lebih menjaga kepentingan-kepentingan aturan hukum syariat agama Islam, masyarakat lebih memasukkan nilai-nilai syariat dalam jiwa pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. sehingga warga Kampung Medang menganggap suatu perbuatan yang benar menurut syariat islam sudah pasti benar pula di lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka.

Konsep pernikahan pada masyarakat Kampung Medang adalah perkawinan itu menurut mereka didasari oleh ajaran agama islam, ajaran islam mengajak umatnya atau penganutnya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk mencegah terjadinya perzinahan. Sebagaimana kutipan wawancara yang disampaikan oleh Pemuka Agama di Kampung Medang berikut ini:

“Pernikahan itu ngikutin jejak Rosul aja bagi saya ma. Karenakan ada hadist yang mengatakan : sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan agama. Karena kalo dari ketentuan islam itu yang harus dijaga diutamakan, jangan sampai orang tersebut melakukan zina diluar nikah kan itu pokok utama yang paling kita jalankan. cumakan kalo istilahnya sudah selama sekian sudah saling suka saling cinta itukan yang direpotkan yang diresahkan akan melakukan perbuatan zina” (Zen, wawancara: Rabu, 22 Juli 2020).

Hal senada disampaikan juga oleh Staf Desa Sukamulya, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Perkawinan itu adalah menjalankan sunah-sunah Nabi Rosulullah Syaidina Muhammd SAW, kan kata Nabi Muhamad salah satu sunah terbesar itu menikah itu tadi, karena didalam pernikahan didalam rumah tangga banyak sekali ladang-ladang pahala yang bisa kita raih dan salah satunya menjauhkan kita dari maksiat, selain itu tujuan masyarakat menikahkan anaknya adalah untuk menghindari perbuatan zina” (Suheri, wawancara: Jum’at, 24 Juli 2020).

Masyarakat Kampung medang beranggapan bahwa dalam hukum Islam, batas pernikahan itu dibatasi oleh usia dewasa (baliq) baik laki-laki maupun perempuan, yang syarat dan rukunya sudah diatur secara rinci, misalnya suami sanggup memberikan nafka lahir dan batin, sebagaimana yang dikatakan oleh Staf Desa Sukamulya dalam kutipan wawan cara berikut ini, beliau mengatakan:

“Jadi setau saya agama islam tidak melarang, tidak mengharamkan pernikahan dibawah umur, selagi yang melakukan pernikahan (suami-istri) dan keluarganya menyetujui dan suami-istri sudah sanggup, suami sudah sanggup memberi nafkah lahir batin dan mereka sudah siap untuk menjalankan rumah tangga, dalam hukum islam setau saya tidak ada larangan, jadi sah-sah saja” (Suheri, wawancara: Jum’at 24 Juli 2020).

Dan tentu saja jika dilihat pada praktik hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, terkesan bertentangan karena terkait dengan pembatasan usia dalam melaksanakan perkawinan. Budaya hukum masyarakat Kampung Medang dalam melaksanakan perkawinan cenderung tidak memperdulikan batasan usia menurut Undang-Undang dan derajad pendidikan.

C. Analisis Fenomena Pernikahan Dini

Dalam pembahasan ini peneliti berusaha menganalisis hasil penelitian menggunakan teori perilaku masyarakat, dengan harapan bisa mengetahui

pengaruh budaya masyarakat dalam membentuk budaya hukum masyarakat di Kampung Medang. Karena pada prinsipnya pengaruh budaya pada suatu masyarakat dapat berpengaruh kuat terhadap perilaku hukum yang diterapkannya. Biasanya kebudayaan dalam suatu lingkungan masyarakat bisa dipengaruhi oleh faktor agama, adat dan hukum. Dalam pembahasan ini peneliti berusaha menganalisis mengenai faktor dominan yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

D. Praktik Pernikahan Usia Dini di Kampung Medang Desa Sukamulya

Hasil penelitian tentang berlangsungnya praktik pernikahan usia dini di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, ternyata dipengaruhi berbagai hal berikut:

- 1) Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Tergolong Rendah Berdasarkan temuan peneliti dilapangan yaitu masih seringnya dijumpai kasus pernikahan usia dini yang dilakukan masyarakat Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan pemerintah mengenai batas usia pernikahan masih sangat rendah.

Dari hal ini bisa kita analisis bersama, bahwasanya hukum tidak selalu bersumber dari Perundang-Undangan, melainkan bisa muncul dari perilaku masyarakat. Karenanya struktur budayalah yang menjadi pondasi dalam membangun perilaku hukum pada masyarakat. Dari hal ini maka secara otomatis kaidah-kaidah hukum itu dibangun

berdasarkan interaksi antar sesama masyarakat itu sendiri. Hal yang demikian biasanya akan berjalan lebih tertip dan efektif dari pada hukum yang diatur oleh pemerintah, karena suatu persoalan yang muncul disebabkan juga oleh perubahan alam dan kehidupan sosial (Ali: 161).

Berkaitan dengan hal diatas bapak sosiologi hukum asal Australia Eugen Ehrlich mengemukakan hal yang sama dalam karyanya yang bertema *"Fundamental Prinsiple of the Sociologi of Law"*, menyampaikan bahwa:

"At the present as weii as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself. Law was to be comprehended only as a function of society. There were two vital, complementary sources of law:

- (1) Legal history and jurisprudence, that is, useful precedents and written commentaries and*
- (2) "Living Law", derived from current custom within societies and, in particular, from the norm-creating activities of the numerous grouping in wich members of society were involved" (Ehrlich: 1912).*

Arti: *"Baik saat ini atau sampai kapanpun, pusat perkembangan hukum, tidak terletak pada Perundang- Undangan, tidak juga pada ilmu hukum, dan tidak juga pada putusan pengadilan melainkan terletak pada masyaakat itu sendiri. Hukum hanya bisa dipahami sebagai fungsi masyarakat. Ada dua sumber hukum yang penting dan komplementer:*

- (1) Sejarah hukum dan yurisprudensi, yaitu presiden dan komentar tertulis, dan*
- (2) "Hukum yang Hidup", yang bersal dari kebiasaan saat ini didalam masyarakat dan khususnya dari tindakan menciptakan norma dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam anggota masyarakat" (Ehrlich: 1912).*

Jadi, salah satu dari dua sumber hukum adalah "hukum yang hidup" yang tercipta dari hubungan diantara sesama warga

masyarakat. Untuk menciptakan sebuah hukum yang baik tidak hanya diperlukan pengetahuan mengenai hukum saja, akan tetapi internalisasi dan aplikasi pengetahuan dalam sikap dan perilakupun juga diperlukan.

- 2) Masih Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Buatan Manusia.

Budaya hukum di Kampung Medang masih sangat kuat dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum fikih pada ajaran agama Islam yang bersumber langsung dari sang pencipta-Nya. Sumber hukum fikih awalnya merupakan wahyu dari Allah serta perkataan dan perlakuan Nabi, yang pada periode saat ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah (hadis), sehingga tidak heran jika kaidah hukum fikih menjadi pondasi yang kokoh dalam membentuk pola pikir masyarakat yang dijadikan dasar utama untuk menjalankan setiap perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu kepercayaan masyarakat Kampung Medang terhadap hukum buatan manusia dinilai masih kurang.

Guna membangun perilaku hukum yang baik, yang diharapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan dari pemerintah, hendaklah ditanamkan dasar-dasar yang dinilai bisa membangun suatu perilaku hukum yang baik pula. Dalam hal ini dasar-dasar yang berperan penting mempengaruhi perbuatan hukum adalah para pelaku hukumnya (subjek hukum) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

Satjipto (seperti dikutip Ali, 2009: 162), salah satunya adalah dengan adanya komunikasi hukum.

Temuan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Medang, belum ada komunikasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat terkait untuk mensosialisasikan aturan hukum mengenai Perkawinan kepada masyarakat di Kampung Medang. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh pelaku nikah dini melalui wawancara sebagai berikut:

“Disini ma belum pernah ada penyuluhan tentang aturan perkawinan, kalau di KUA Rumpin pas mau ijabnya semua dibacakan, kayak kewajiban suami-istri setelah menikah,itu aja sih” (Ningsih, wawancara: Kamis, 23 Juli 2020).

Berkaitan dengan hal diatas, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Staf Desa Sukamulya, dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Setau saya selama saya kerja disini belum ada, emang belum... kalo kearah sana ya. Seharusnya emang ada yang dilakukan pemerintah, seperti penyuluhan gitu kan?? Penyuluhan mengenai aturan Perkawinan kepada masyarakat, kepada warga-warganya” (Suheri, wawancara: Jum'at, 24 Juli 2020).

Ini merupakan hal yang wajar jika masyarakat kurang paham mengenai hukum positif yang diberlakukan oleh pemerintah dan hanya memahami terhadap kaidah-kaidah hukum fikih dalam agama Islam saja.

Agar hukum dapat diterima dalam kelompok masyarakat, maka dibutuhkan juga peran serta pemerintah, bisa melalui aparat desa yang

bekerjasama dengan tokoh masyarakat ataupun aktifis masyarakat untuk berupaya mensosialisasikan pentingnya mentaati aturan hukum pemerintah tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dalam masyarakat setempat. Sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang selaras dengan hukum positif dari negara dan hukum Islam. Dengan adanya komunikasi hukum yang baik dan tepat, maka secara otomatis pengetahuan hukum untuk membangun perilaku hukum seperti yang diinginkan akan tertanam secara alami dan diharapkan mampu membentuk pola pikir masyarakat yang sadar dan patuh akan hukum positif di negaranya, sebagaimana mereka sadar dan patuh terhadap ketentuan dan tujuan dari hukum Islam.

3) Kuatnya Norma dan Dogma Ajaran Agama Islam

Kaidah hukum fikih, dogma agama, serta doktrin dari para tokoh agama membangun perilaku masyarakat untuk membuat hukum yang termuat didalam Undang-Undang menjadi hukum yang “mati”, karena tidak bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga belum bisa diterima dengan baik pula oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian dilapangan, peraturan perundang- undangan mengenai aturan perkawinan ternyata belum efektif, dikarenakan banyak masyarakat di Kampung Medang ini tidak memperdulikan dan terkesan mengabaikannya begitu saja, bahkan memandang aturan hukum dari pemerintah itu dianggap seperti menzholimi umat islam, karena adanya batasan umur dalam aturan pernikahan maka dianggap pelanggaran hak seseorang untuk

melangsungkan pernikahan dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara dengan Tokoh Agama Kampung Medang, sebagai berikut:

“Undang-Undang peraturan perkawinan kenegaraan ya?? Terkait pernikahan, sebenarnya menurut saya pribadi ini termasuk banyak yang istilahnya menzholimlah sama orang islam, kalo menurut pribadi saya. Karena kalo dari ketentuan islam itu yang harus dijaga diutamakan jangan sampai orang tersebut melakukan zina diluar nikah kan itu pokok utama yang paling saya jalankan. Cumankan kalo istilahnya sudah selama sekian sudah saling suka saling cinta itukan yang direpotkan yang diresahkan”(Zen, wawancara: Rabu, 22 Juli 2020).

Hal ini membuktikan bahwasanya perilaku masyarakat belum bisa diatur hanya dengan menggunakan Undang-Undang saja, dikarenakan adanya unsur lain yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat, seperti agama, norma, adat kebudayaan dan lainnya. Sehingga dalam hal ini telah menjadi salah satu bukti kebenaran kalau Indonesia memang Negara yang sangat penuh dengan pluralisme atau keberagaman, termasuk keberagaman dalam hal hukum. Untuk itu kita sebagai warga negara yang baik diharuskan memiliki sifat toleransi kepada sesama, tidak terkecuali dalam hal perilaku hukum pada suatu kalangan yang unik dan berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Lawrence dalam buku Sistem Hukum (terjemah bahasa Indonesia) bahwa:

“Tidak ada hukum yang berlaku seretuis persen efektif . kita senantiasa toleransi terhadap ketidak sesuaian yang ada, seberapa besar kita toleran, sangat beragam dari satu perilaku kejenis perilaku yang lain” (Lawrence, 2009: 286).

Dari kutipan Lawrence diatas, penulis telah mendapatkan jawaban bahwasanya dalam menyadarkan masyarakat terhadap hukum dalam konteks pernikahan di usia dini tidak perlu adanya tindak pidana. Karena untuk menjamin ketertiban hukum masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, hanya cukup dengan bertoleransi untuk menjawab semua fakta yang ada di lapangan.

Berdasarkan temuan data yang peneliti dapatkan dilapangan, terjadinya praktik pernikahan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ini disebabkan karena masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Untuk dapat mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap hukum Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat dua indikasi, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Secara konsepsional masyarakat belum mengetahui secara pasti aturan mengenai hukum tertulis khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Meskipun demikian, dalam hal ini masyarakat sudah tahu mengenai adanya aturan yang berkaitan dengan batasan usia dalam hal pernikahan. Hal demikian didukung dengan pernyataan oleh semua responden yang menjadi informan saat wawancara, mengakui bahwa mereka mengetahui adanya aturan dari pemerintah secara tertulis yang

mengatur tentang batasan usia pernikahan dan keharusan dalam pencatatan nikah sebagaimana disebutkan dalam pasal diatas. Berkaitan dengan hal ini permasalahan yang peneliti temukan dilapangan adalah masih adanya praktik pernikahan usia dini yang tetap saja dilaksanakan oleh masyarakat meskipun pada kenyataanya mereka sudah mengetahui aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam penjabaran temuan data diatas maka peneliti dapat menganalisis, bahwasanya pengetahuan hukum masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah ada, hanya saja tanggapan atau respon serta sikap masyarakatnya masih acuh atau terkesan tidak memperdulikan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap budaya masyarakat yang dilihat dari perilaku hukumnya, dimana masyarakat Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor malah bersikap acuh atau terkesan tidak perduli terhadap hukum tertulis yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya aturan hukum mengenai pernikahan yang masyarakat abaikan. Menurut peneliti terdapat dua alasan yang melatarbelakanginya, yaitu:

- 1) Kepercayaan Masyarakat yang Dipengaruhi Oleh Kuatnya Doktrin dan Norma Dalam Agama Islam.

Kaidah hukum fikih, dogma agama, serta doktrin dari para tokoh agama membangun perilaku masyarakat untuk membuat hukum yang termuat didalam Undang-Undang menjadi hukum yang “mati”,

karena tidak bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga belum bisa diterima dengan baik pula oleh masyarakat.

Yang mana dalam hal ini, aturan agama Islam oleh masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor telah dijadikan sebagai bagian dari setiap aktifitasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hal inilah yang mempengaruhi masyarakat dapat bersikap acuh atau abai dan terkesan tidak peduli terhadap hukum tertulis yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya mengenai aturan pernikahan.

Hal ini membuktikan bahwasanya perilaku hukum yang ada di masyarakat belum bisa diatur hanya dengan menggunakan Undang-Undang saja, dikarenakan adanya unsur lain yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat, seperti agama, norma, adat kebudayaan dan lainnya. Dalam hal ini dampak yang timbul di masyarakat adalah munculnya budaya yang tidak menerima hukum yang diluar kalanganya sendiri (*parokial culture*).

- 2) Kurangnya Rasa Peduli Aparatur Pemerintah Terhadap Hukum di Daerahnya.

Kurangnya kepedulian aparat pemerintah seperti lembaga hukum serta kepala pemerintah setempat terhadap hukum di daerahnya, yang belum dilaksanakan oleh masyarakatnya ini juga memberikan dampak. Yang akibat dari dampak tersebut adalah masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor bersikap masa bodoh dalam menanggapi hukum

positif yang dibuat oleh pemerintah, karena dari aparat pemerintah daerahnya tidak pernah mengadakan penyuluhan yang bertujuan untuk mengajak masyarakatnya agar mampu menciptakan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

2. Kepatuhan Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan hukum masyarakat Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya mengenai aturan usia pernikahan ini masih sangat rendah, karena masih ada masyarakatnya yang mempraktikkan nikah di usia dini kepada anaknya.

Jika dilihat dari segi kepatuhan masyarakat mengenai norma atau aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah terkait dengan UU Perkawinan, secara sadar mereka pun paham bahwa bukti otentik dalam suatu perbuatan hukum (pernikahan) dapat memberikan manfaat yang positif terhadap pelakunya. Keterangan ini didapatkan dari sebagian besar pernyataan responden yang diwawancarai oleh peneliti. Dalam pernyataannya masyarakat mengetahui mengenai aturan diwajibkannya suatu pernikahan untuk dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku khususnya berkaitan dengan batasan usia dan pencatatan nikah.

Ini menjadi dilema dengan fakta yang ada di lapangan, ternyata pengetahuan masyarakat tidak berjalan beriringan dengan praktiknya. Karena kenyataannya yang dijadikan dasar utama oleh masyarakat dalam melaksanakan praktik pernikahan yang paling penting adalah suatu pernikahan cukup dinyatakan “sah” menurut agama serta disaksikan dan

didukung oleh warga masyarakat sekitar lingkungannya. Pengaruhnya adalah kaidah hukum fikih yang dijadikan sebagai dasar yang sangat kuat, sehingga membentuk paradigma berpikir yang merupakan ujung tombak untuk dijadikan senjata utama masyarakat dalam setiap perilaku hukum. Selain itu dengan ditopang fanatisme terhadap kaidah-kaidah hukum fikih, tokoh masyarakat, dan kurangnya kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia membuat masyarakat kurang percaya terhadap hukum yang dibuat oleh manusia, karena dianggap kurang mempertimbangkan aspek *ukhrawi*. Sehingga kepercayaan terhadap hukum buatan manusia (aturan pemerintah) sangat rendah dan tidak bisa dijalankan secara maksimal.

Hal ini terkesan mengesampingkan aturan hukum dari Negara, karena dapat mengakibatkan tidak terimplikasinya antara pengetahuan dan praktik pelaksanaan terhadap hukum yang diberlakukan oleh pemerintah. Walaupun pada dasarnya masyarakat sadar dan meyakini dengan mengindahkan aturan hukum dari pemerintah dapat lebih menjamin kepastian (hak dan kewajiban) masyarakat sebagai warga Negara.

Berkaitan dengan pemaparan peneliti diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam membangun dan menjalankan kehidupan bermasyarakat pada dasarnya berpegangan pada norma atau aturan agama Islam yaitu hukum fikih. Masyarakat meyakini

bahwasanya dalam suatu pernikahan yang terpenting adalah benar menurut hukum syariat Islam.

Menurut peneliti pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak positif dari aturan hukum pemerintah itu sudah ada, meskipun masyarakat belum patuh untuk mengindahkannya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan guna mempersiapkan pergeseran kemajuan zaman dari masyarakat klasik menuju masyarakat yang lebih modern, terutama modern dalam pola pikirnya.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, dalam upaya mengembangkan pola pikir masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor untuk bisa menjadi masyarakat modern yang patuh terhadap aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, namun tetap melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah mereka yang bernuansa *Islamic culture*.

E. Budaya Hukum Masyarakat Mendukung Praktik Pernikahan Usia Dini

Dalam poin ini peneliti berusaha untuk menganalisis dari segi budaya hukum masyarakat di Kampung Medang yang membentuk perilaku hukum masyarakat, terkhusus masih terjadinya praktik nikah diusia dini.

Disini peneliti akan menggunakan teori budaya hukum sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman. Lawrence mendefinisikan sebagai berikut:

"We define legal culture to mean attitudes, values and opinions held in society, with regard to law, the legal system and its various parts. So define, it's the legal culture which determines when, why, and where, people use law, legal institution or legal process: and when they use other institutions, or do nothing. In other words, culture factors are an essential ingredient in turning a static structure and a static collections of norms into a body of living law. Adding the legal culture to

the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motions” (Lawrence, 2009: 76).

Artinnya : *“Kita mendefinisikan hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat-pendapat sosial yang dianut dalam masyarakat mengenai hukum dan beragam bagianya. Artinya budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa dan dimana orang-orang menggunakan hukum atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan institusi-institusi lainnya atau tidak melakukan apapun. Dengan kata lain, faktor-faktor budaya merupakan unsur esensial untuk dapat mengubah sesuatu struktur statis dan suatu kumpulan norma- norma statis menjadi suatu kumpulan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum dalam hal ini seperti memutar jarum jam atau menghidupkan sebuah mesin. Budaya hukum itu menggerakkan sesuatu” (Lawrence, 2009: 76).*

Dapat dipahami bawasanya budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap dan pendapat masyarakat yang menjadi dasar penggerak suatu perilaku hukum di masyarakat, sebagai suatu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Pada dasarnya budaya hukum masyarakatlah yang menentukan nilai perbuatan atau perilaku hukum dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Alangkah baiknya jika perilaku hukum kembali pada awal kemunculanya, maksudnya tidak lahir dari konsepsi Undang-Undang buatan manusia akan tetapi lahir berdasarkan interaksi antar sesama masyarakat yang kemudian membentuk perilaku (Ali, 2009: 161).

Sehingga hal ini saling berhubungan, bahwasanya kebiasaan dalam suatu masyarakat sangat efektif dalam menciptakan “hukum yang hidup” artinya kebiasaan masyarakatlah yang lebih diterima oleh masyarakat itu sendiri karena secara tidak langsung memuat nilai, sikap, pendapat dan perilaku yang keberadaanya diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Kemudian yang menjadi pertanyaanya adalah, jika suatu hukum terlahir dari kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari kemaslahatan sosial di zaman sekarang, apakah tidak perlu adanya upaya pemerintah (pihak yang berwenag) untuk kemudian membuat aturan yang mengikat dengan tujuan kearah yang lebih baik? Maka sudah pasti jawabanya adalah sangat diperlukan, karena budaya hukum di setiap kelompok masyarakat pasti berbeda-beda, sebab konsepsi nilai, sikap, pendapat dan perilakunya juga berbeda. Tujuan diperlukanya upaya dari pemerintah dalam konteks kenegaraan adalah untuk menyatukan kesamaan konsepsi dalam suatu perilaku hukum masyarakat yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya tentang bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan kesamaan konsepsi itu? Apalagi dinegara kita Undang-Undang adalah sebagai dasar hukum Negara.

Dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat yaitu:

- 1) Komunikasi Hukum

Komunikasi hukum sangat penting dilakukan untuk menjadikan peraturan yang sudah dibuat pemerintah agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena terkadang peraturan yang sudah ada misalnya, peraturan mengenai pernikahan anak di usia dini, yang sudah diatur secara rinci dalam suatu perundang-undangan menjadi “mati” karena keragaman perilaku hukum di masyarakat.

Maka dari itulah pentingnya untuk dilakukan komunikasi hukum dengan masyarakat (Laurence, 2009: 285-286). Ada

berbagai cara untuk mengkomunikasikan hukum dengan masyarakat, salah satunya dengan penyuluhan hukum yang harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan secara teratur kepada masyarakat. Penyuluhan mengenai hukum secara tidak langsung akan memberikan informasi kepada masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus berisikan tentang hak dan kewajiban serta manfaat dan sanksinya apabila seseorang mentaati dan melanggar hukum tertentu. Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum tertentu yang diatur dalam perundang-undangan.

2) Pengetahuan Hukum

Asas hukum normatif Indonesia telah diatur dalam Pasal II AB yang berbunyi, “*Seluruh penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, dianggap mengetahui seluruh aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia*”. Dalam hal ini

menurut Ali (2009: 165), bahwa asas hukum tersebut dalam kenyataannya hanya merupakan fiksi hukum, alasannya karena sangat mustahil ada masyarakat yang mampu mengetahui seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pada kenyataannya ada suatu aturan yang dibuat oleh badan hukum Negara, dan ada pula yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang bersandar pada nilai-nilai moral dan agama.

Jadi dari hal diatas tidak ada seorangpun yang mengetahui semua aturan hukum yang ada. Masalah pengetahuan hukum itu biasanya berkaitan dengan persoalan posisi. Karena persoalan posisi bisa memnentukan tentang pengetahuan hukum dari seseorang. Contohnya seorang hakim Pengadilan Negeri kurang mengetahui mengenai hukum nikah, pembagian harta waris dan hukum keperdataan lainnya, dan begitu pula sebaliknya.

Selanjutnya peneliti juga mencoba menganalisa tipologi budaya masyarakat yang ada di Kampung Medang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat yang mendukung praktik pernikahan usia dini di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Dari tipologi masyarakat ini akan diketahui penyebab masyarakat tidak patuh kepada hukum positif mengenai aturan usia menikah.

Dalam pembahasan ini akan diawali dengan pandangan pakar hukum mengenai perilaku hukum yang menjadi awal munculnya perilaku taat hukum dan dan perilaku tidak taat kepada hukum.

Menurut Ali (2009: 143-144), perilaku hukum merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan perintah, atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum.

Dari definisi diatas dapat kita pahami bersama, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan pemerintah atau Undang-Undang, maka perilaku itu disebut dengan perilaku hukum, termasuk pula perbuatan yang menyimpang dari kaidah hukum. Berarti dalam hal ini dapat dibedakan, kalau perilaku hukum itu memiliki dua sifat, yaitu perilaku taat hukum (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan perilaku tidak taat hukum (menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku).

Menurut Hadikusuma (1986: 54), unsur budaya dan tipologi masyarakat merupakan cerminan dari perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dikelompokkan menjadi tiga kategori antara lain adalah budaya parokial (*parokial culture*), budaya partisipan (*participant culture*), dan budaya subjek (*subject culture*).

Pola pikir pada budaya masyarakat parokial masih sangat terbatas, artinya masyarakat masih kuat bertahan dengan tradisi hukumnya sendiri. Mereka meyakini bahwasanya kaidah-kaidah budaya yang merupakan warisan leluhur harus terus dijaga dan dilestarikan agar selalu mendapatkan keberkahan. Masyarakat parokial sangat bergantung kepada pemimpin, maksudnya seorang pemimpin disini menjadi pusat atau sentralnya. Mereka percaya dan menyerahkan setiap urusanya hanya kepada pemimpin, untuk itu

setiap keputusan dari pemimpin selalu mereka patuhi, karena kepercayaan mereka terhadap itulah adanya sanksi ghaib jika melanggar aturan. Oleh karena itu masyarakat parokial tidak berkembang dan tidak akan mudah menerima hukum yang lain diluar kalangnya, dengan anggapan karena hukumnya sendiri lebih baik dari hukum yang lain (Hadikusuma, 1986: 55).

Untuk budaya hukum subjek, masyarakatnya memiliki ciri sifat takluk kepada pemimpin dan cara berpikir masyarakatnya sedikit lebih berkembang. Mereka sudah ada perhatian mengenai hukum yang umum, sudah ada sikap untuk menerima atau menolak, meskipun cara penyampaianya bersifat pasif dikarenakan perilaku sifat taklunya kepada pemimpin. Pola pikir yang dibangun oleh masyarakat dengan budaya takluk, beranggapan bahwa kalau dirinya tidak berdaya dalam mempengaruhi hukum apalagi sampai merubah sistem hukum, konsepsi hukum, keputusan hukum dan norma-norma hukum yang dihadapinya, meskipun hukum yang disajikan terkadang bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakat. Ketaatan masyarakat pada tipologi subjek ini bukan hanya selalu menerima dan mematuhi keputusan dari pemimpinnya tetapi karena dibangun oleh sifat takluk mereka karena anggapan ketidak mampuan mereka.

Sedangkan untuk masyarakat dengan budaya Partisipan (turut berperan serta) pola pikir masyarakatnya sudah mulai berkembang dan maju. Sebagian besar masyarakat sudah merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan mereka

turut aktif berperan serta karena merasa terlibat menjadi bagian dari kehidupan hukum yang umum, baik menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya (Hadikusuma, 1986: 57).

Dari penjabaran tiga tipologi masyarakat diatas, maka tipologi masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabuperen Bogor bisa dikatakan mendekati karakter tipologi masyarakat subjek (*subject culture*). Karena karakteristik masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan tentang adanya aturan pemerintah yang berkaitan dengan usia pernikahan serta sifat masyarakat yang merasa kurang memiliki andil dalam hukum (kurangnya partisipasi terhadap hukum). Dalam hal ini masih bisa ditemukan karakteristik masyarakat yang memiliki sifat patuh dan takluk kepada penguasa (ulama, kiayi, tokoh agama, aparat desa dan lainnya).

Untuk mewujudkan budaya hukum masyarakat di Kampung Medang kearah yang lebih baik, bisa dimulai dengan merubah tipologi budaya masyarakat *subject culture* (kurang peduli terhadap hukum) menuju budaya hukum *participant culture* (merasa bagian dari hukum), perubahan bisa diawali dari atas kebawah, misalnya dari orang-orang yang memiliki pengaruh besar kepada masyarakat (ulama, aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya). Karena tipologi *subject culture* bergantung pada kekuatan kalangan yang diikuti.

Karena seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam, hal ini menjadikan lingkungan masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor sangat kental dengan nuansa budaya Islami. Oleh karena itu secara tidak langsung, budaya hukum di masyarakat terbentuk dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh agama Islam. Bagi masyarakat ajaran dalam agama Islam sangat penting, karena dijadikan sebagai kontruksi bangunan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang paling besar dan sangat kuat. Hal ini juga yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia menjadi terkesan kurang diindahkan, sehingga jarang ditemukan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan ketaatan hukum terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya budaya hukum masayarakat dapat mendukung praktik pernikahan usia dini di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, dikarenakan ketidak taatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh tipologi masyarakatnya masih dalam tataran *subject culture* yang tergolong kelompok yang susah menerima hukum dari luar kalangan mereka sendiri. Dalam artian, bahwa masyarakat menjadikan hukum islam (fikih) sebagai hukum sendiri, namun dilain sisi masyarakat juga mengetahui kalau ada hukum yang diatur oleh Negara.

BAB V PENUTUP

Terjadinya praktik pernikahan usia dini di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

disebabkan karena kurangnya komunikasi hukum yang baik kepada masyarakat khususnya mengenai aturan dalam perkawinan. Selama ini perilaku hukum utama masyarakat, berpedoman pada aturan hukum fikih yang mereka dapatkan melalui komunikasi dengan para ulama dan tokoh agama setempat.

Maka tidak heran, jika perilaku taat hukum terhadap hukum positif yang dibuat oleh pemerintah tidak tercermin dalam perilaku hukum masyarakat dalam kehidupan. Dengan kata lain ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu usia 19 tahun, seakan-akan hanya sebagai fiksi hukum belaka.

Selanjutnya dalam suatu budaya yang ada di masyarakat yang menjadi penggerak perilaku hukumnya karena pengaruh beberapa hal seperti norma yang ada dalam agama, moral, adat istiadat dan hukum. Jika norma-norma

hukum kurang dikomunikasikan, maka secara otomatis norma-norma yang ada di dalam hukum itu sendiri tidak akan dilihat oleh masyarakat, karena tertutupi oleh kuatnya norma-norma yang lain.

Budaya merupakan pengaruh yang sangat menentukan terhadap perilaku hukum suatu masyarakat. Tipologi masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, masuk kedalam tipologi *subject culture*. Dalam tipologi ini, masyarakat bukan hanya selalu menerima dan mematuhi keputusan dari pemimpin, tetapi juga karena dibangun oleh sifat takluk mereka karena anggapan ketidak mampuan mereka.

Pada karakteristik masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai adanya aturan yang berkaitan dengan usia dalam pernikahan, namun sikap masyarakat masih kurang memiliki andil dalam hukum. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya praktik pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat.

Pada intinya tipologi masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, tergolong dalam tipologi *subject culture* karena masyarakat menjadikan hukum islam sebagai hukum sendiri, dalam arti sebagai tolak ukur benar atau salah suatu hukum, tetapi dilain sisi masyarakat juga mengetahui bahwa ada hukum yang diatur oleh pemerintah.

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor masih tergolong rendah. Akibatnya masyarakat kurang peduli terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini didukung karena pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang kurang maksimal, khususnya dalam hal pernikahan anak usia dini. Terjadinya hal demikian disebabkan oleh:

- a. Kuat dan kentalnya nilai dan norma agama islam yang masuk dalam karakter budaya hukum masyarakat.
- b. Belum adanya komunikasi hukum yang baik dari pemerintah mengenai penyuluhan tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia kepada masyarakat, yang menyebabkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum tergolong rendah.
- c. Karena masyarakat Kampung Medang termasuk dalam tipologi *subject culture*, sehingga masyarakatnya tergolong kedalam kelompok yang susah untuk menerima hukum dari luar kalangan mereka sendiri.
- d. Masalah perilaku hukum, bisa dimulai dengan merubah tipologi budaya masyarakat *subject culture* (kurang peduli terhadap hukum) menuju budaya hukum *participant culture* (merasa bagian dari hukum), perubahan itu bisa diawali dari atas kebawah, misalnya orang-orang yang memiliki pengaruh besar kepada masyarakat (aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya). Karena tipologi *subject culture* bergantung pada kekuatan kalangan yang diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang – Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 2019.
_____. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Tahun 1974.
_____. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014.
_____. Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 20 Tahun 2003.
_____. Kompilasi Hukum Islam.

B. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ary, H Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quuran dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ihromi, T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Maleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nusa Media, Cet. I.
- M. Lawrence, Friedman. 2009. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Maggalatung, A Salman. dan Siagian, Amrizal. 2015. *Pengantar Studi Antropologi Hukum Indonesia*. Tangerang Selatan: UIN Jakarta.
- Muyadi, Yad, at al. 2013. *Sosiologi SMA Kelas X*. Bogor: Yudhistira
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sarwono. 2007. *Psikologis Remaja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *“Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah- Masalah Sosial”*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Widiaworo, Erwin. 2018. *Mahir Penelitian Pendidikan Modern*. Yogyakarta: Araska.

C. Sumber Lain

- Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal, Studi Pemuda, Vol.3, No.1, Mei 2014.
- Dwi Rifani, *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2011.
- <https://kecamatanrumpin.bogorkab.go.id/desa/27> diakses pada hari Kamis, 02 Juli 2020,

Pukul 16.15 WIB.

<https://snw-partners.com/index.php/tag/perkawinan-dini> diakses pada hari Kamis, 02 Juli 2020, Pukul 20.30 WIB.

<https://www.alodokter.com/ini-alasan-pernikahan-dini-tidak-disarankan> diakses pada hari Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 13.45 WIB.

Mubasyaroh, Analisis Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal, Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016

Susanto. 2012. *"Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Suka Bumi Jawa Barat"*. Jurnal Online. Hal 191-209.(diunduh 10 November 2019).

D. Wawancara :

Abidin, Zaenal (RW.08). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kp. Medang RT.01/08, Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Kamis, 23 Juli 2020).

Aswiah (Orang Tua Pelaku Nikah Dini). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kp. Medang RT.01/08, Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Kamis, 23 Juli 2020).

Muslih (RT.02). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kp. Medang RT.02/08, Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Kamis, 23 Juli 2020).

Nengsih, Setia (Pelaku Nikah Dini). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kp. Medang RT.01/08, Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Kamis, 23 Juli 2020).

Nurzen (Amil/Tokoh Agama). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kp. Medang RT.02/08, Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Rabu, 22 Juli 2020).

Putri, Sifa W (Pelaku Nikah Dini). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kp. Medang RT.01/08, Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Kamis, 23 Juli 2020).

Samsiah (Orang Tua Pelaku Nikah Dini). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kp. Medang RT.01/08, Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Kamis, 23 Juli 2020).

Suheri (Staf Desa Sukamulya). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kantor Desa Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Jumat, 24 Juli 2020).

Ramadani, Nia (Pelaku nikah dini). 2020. *"Pernikahan Usia Dini"*. Bogor: Kp. Medang RT.02/08, Sukamulya, Rumpin. (wawancara, Rabu, 29 Juli 2020).

Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat

Hukum dan Budaya

Dalam buku ini penulis berusaha menganalisis fenomena budaya hukum menggunakan teori perilaku masyarakat, dengan harapan bisa mengetahui pengaruh budaya masyarakat dalam memebentuk budaya hukum masyarakat di Kampung Medang. Karena pada prinsipnya pengaruh budaya pada suatu masyarakat dapat berpengaruh kuat terhadap perilaku hukum yang diterapkannya. Kebudayaan dalam suatu lingkungan masyarakat bisa dipengaruhi oleh faktor agama, adat dan hukum. Dalam pembahasan di buku ini peneliti berusaha menganalisis mengenai faktor dominan yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat di Kampung Medang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Buku ini mengungkap bagaimana suatu masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang bersumber dari budaya mereka.